

LAPORAN AKHIR

Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

LAPORAN AKHIR

Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Kajian yang berjudul :

“TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA BANJARMASIN”

adalah hasil karya tim peneliti dan sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara nyata tertulis dan diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banjarmasin, Mei 2020

Atas nama Tim Peneliti

Ketua

Materai



(Prof. M. Handry Imansyah, MAM, Ph.D.)

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kajian : Laporan Akhir Kajian Tingkat
Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin
2. Lokasi : Kota Banjarmasin
3. Penanggung Jawab :
4. Ketua Tim Peneliti :
- Nama : Prof. M. Handry Imansyah, MAM, Ph.D.
- Jabatan/Pangkat/Gol Ruang : Guru Besar/Pembina Utama Madya/IV D
- Alamat :
- Telepon/ HP : 08118838200
- E mail : mhandryiman@gmail.com
5. Anggota Tim :1. Dr. Muzdalifah, SE, M.Si.
2. Dr. Dewi Rahayu, SE, MP.
3. Syahrituah Siregar, SE, MA.
4. Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, Pg.D.
5. Sri Maulida, S.E.Sy., MEI.
6. Sumber Dana : APBD Kota Banjarmasin
7. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2020

Banjarmasin, Mei 2020

Mengetahui dan menyetujui.

Kepala Barenlitbanga Kota
Banjarmasin

Ketua



Ir. Sugito, MT
NIP. 19611108 199003 1 002

Prof. M. Handry Imansyah, MAM, Ph.D
NIP. 19600401 198703 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA BANJARMASIN

Bagian 1 : Latar Belakang Kajian

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengkaji tingkat pengangguran terbuka (TPT) karena sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang selalu dijadikan rujukan mengenai kinerja pemerintah, secara nasional TPT di Kota Banjarmasin lebih rendah dari tingkat nasional, namun jika dilihat dari level provinsi Kalimantan Selatan maka TPT Kota Banjarmasin adalah yang tertinggi, dalam kajian ini akan diidentifikasi penyebab tingginya TPT di Kota Banjarmasin, menganalisis sektor yang memiliki *multiplier* kesempatan kerja yang tinggi sebagai penyerap pengangguran, kebaruan dari kajian ini adalah menggunakan alat analisis IO untuk simulasi dan memprediksi capaian terhadap penurunan TPT di Kota Banjarmasin Periode 2021-2025. Untuk membantu para pembuat kebijakan, dalam mengatasi TPT yang tinggi di Kota Banjarmasin.

Bagian 2 : Ringkasan Pustaka/ Teoritik

Pengangguran di perkotaan dari berbagai penelitian di Indonesia dan berbagai negara berkembang serta negara maju, menunjukkan tingkat pengangguran memiliki fenomena yang hampir sama yaitu meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan karena migrasi desa kota dan berkembangnya daerah perkotaan melampaui batas administrasi akibat aglomerasi. Selain itu, semakin meningkatnya generasi muda yang berpendidikan yang lebih mudah mencari pekerjaan di daerah perkotaan sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya walaupun harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Perbedaan tingkat upah desa dan kota menjadi salah penyebab tingginya migrasi desa kota

Bagian 3 : Temuan/ Hasil Kajian

Perekonomian Kota Banjarmasin adalah yang paling dominan di dalam kawasan Kalimantan Selatan. Hal ini dimungkinkan karena secara geografis Kota Banjarmasin menjadi pintu gerbang bagi daerah-daerah sekitar menuju pusat pertumbuhan Indonesia di Pulau Jawa. Beberapa sektor ekonomi, seperti Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Transportasi dan Komunikasi menjadi sektor paling dominan.

Jika dilihat dari perkembangan ketenagakerjaan yang ada, telah terjadi kontradiksi. Di tengah perkembangan ekonomi yang relatif paling maju di wilayah Kalimantan Selatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banjarmasin justru paling tinggi. Jumlah penduduk bekerja yang dapat menggambarkan tingkat kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja tumbuh cukup baik. Akan tetapi, hal ini ternyata diikuti oleh bertambahnya jumlah pengangguran yang masih besar. Itulah mengapa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarmasin masih tinggi.

Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin secara umum disebabkan oleh perkembangan Kota Banjarmasin yang pesat, sehingga menarik para kerja dari daerah lain. Hal ini ditunjukkan oleh data migrasi masuk yang positif sebelum tahun 2015. Walaupun, setelah tahun 2015, terjadi migrasi netto yang negatif yang berarti lebih banyak penduduk yang keluar daripada yang masuk, maka fenomena ini dapat dijelaskan dengan tingginya pertumbuhan penduduk di kecamatan-kecamatan di daerah yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin yang tumbuh di atas pertumbuhan tingkat kabupaten dari kecamatan tersebut.

Sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi adalah sektor-sektor yang memang selama ini merupakan sektor yang dominan pembentuk struktur perekonomian Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, terbatasnya lapangan kerja di Kota Banjarmasin yang dicerminkan dengan tingginya angka pengangguran terbuka yang tinggi dapat disiasati dengan penciptaan kesempatan kerja yang tinggi pada sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja dengan kebijakan yang tepat. Selain dari penciptaan kesempatan kerja sektor-sektor yang memiliki *multiplier* yang tinggi, maka peluang kerja di negara lain juga tersedia. Namun, peluang kerja tersebut, kadang tidak dapat dimanfaatkan karena persyaratan yang diminta umumnya tidak dapat dipenuhi oleh para pencari kerja yang ada.

Terjadinya pandemi covid 19 sejak awal Maret yang berawal di Jakarta dan kemudian menyebar sampai ke Banjarmasin memupuskan harapan untuk menciptakan kesempatan kerja. Malah dengan adanya wabah covid 19, terjadi arus pemutusan hubungan kerja yang besar di mana dengan simulasi yang ringan saja, wabah ini menciptakan pengangguran baru sekitar 21 ribu orang.

Bagian 4 : Kebijakan Pemerintah Saat ini (yang terkait dengan kajian)

Untuk menciptakan kesempatan kerja, pemerintah perlu melakukan strategi yang tepat terutama pada sektor-sektor yang dapat dijadikan andalan di dalam menciptakan kesempatan kerja. Strategi tepat didasarkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier kesempatan kerja yang tinggi dan memiliki peranan yang besar di dalam perekonomian sehingga sektor-sektor ini dipacu untuk tumbuh tinggi atau tumbuh di atas rata-rata sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor angkutan dan logistik. Sektor-sektor tersebut sejalan dengan perkembangan di era disrupsi yaitu mengembangkan sektor perdagangan berbasis daring dan dibantu sektor angkutan dan logistik yang juga menjadi tulang punggung sistem penjualan daring atau *online*.

Bagian 5 : Rekomendasi Kajian/ Kebijakan

Dari hasil analisis data-data yang tersedia dan simulasi, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi tingginya Angka Pengangguran Terbuka, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu strategi pertumbuhan yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi.
2. Strategi untuk memacu pertumbuhan itu adalah memilih sektor yang dijadikan prioritas dalam rangka menyerap tenaga kerja di Kota Banjarmasin adalah pada Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Angkutan dan Logistik serta berbagai sektor Jasa yang lain.
3. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor Industri Pengolahan dengan meningkatkan kualitas hasil industri pengolahan dan pendalaman struktur industri
4. Perbaiki struktur perdagangan dengan menyediakan tempat yang nyaman dan menarik baik bagi pedagang maupun pelanggan serta menyediakan market place untuk memperluas paparan para pedagang untuk berdagang secara daring, menyediakan informasi hotel dan restoran yang memberikan beberapa paket wisata di Banjarmasin secara daring, dan bekerja sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan dalam mendukung system pembayaran daring dan non tunai untuk perdagangan daring.
5. Untuk membantu meningkatkan kualitas SDM yang berminat kerja di negara lain, guna mengatasi masalah TPT di Kota Banjarmasin adalah kolaborasi antar sektor dengan dukungan pemerintah dengan memberikan Pelatihan Lisensi/Sertifikasi khusus Profesi dan Kemampuan Bahasa Inggris.
6. Perbaiki dan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk membatasi penularan Pandemi covid-19 pada sektor-sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Sektor Angkutan dan Komunikasi sehingga sektor tersebut masih dapat beraktivitas dan mengurangi pengangguran.

Bagian 6 : Informasi dan Kontak Peneliti

Ketua Tim Peneliti: Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM, Ph.D.

Email: mhandryiman@gmail.com; mhimansyah@ulm.ac.id

HP: 08118838200

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat.

<http://iesp.ulm.ac.id/handry-imansyah/>

Informasi Tambahan : Rujukan dapat dilihat di bagian Daftar Rujukan dari Laporan ini. Bahan pustaka, produk hukum atau penelitian yang menjadi rujukan kajian ini..

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. M. Handry Imansyah, MAM, Ph.D.
NIP : 19600401 198703 1 003
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung
Mangkurat
Jenis Karya : Karya Ilmiah

Selaku ketua yang mewakili anggota tim peneliti, dengan ini menyatakan memberikan kepada Barenlitbangda Kota Banjarmasin Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Free Right Royalty*) atas karya ilmiah yang berjudul **Laporan Akhir Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Free Right Royalty*) ini, Barenlitbangda Kota Banjarmasin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan karya ini selama tetap mencantumkan nama anggota tim peneliti sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini kami buat, agar kajian dan rekomendasi dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Dibuat di : Banjarmasin

Pada tanggal : 31 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



Prof. M. Handry Imansyah, MAM, Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab pengangguran terbuka, menganalisis sektor yang memiliki *multiplier* kesempatan kerja yang tinggi, serta mensimulasi dan memproyeksi sektor yang mampu menyerap pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Banjarmasin merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi, angka ini lebih rendah dari angka nasional. Pengangguran terbuka biasanya dianggap sebagai kinerja suatu perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, sebagian besar pengambil kebijakan berupaya menekan angka pengangguran terbuka di daerahnya.

Metode yang digunakan di dalam kajian ini adalah metode statistik deskriptif untuk menjelaskan fenomena penyebab tingginya TPT dan untuk membuat rekomendasi kebijakan maka dengan digunakan analisis input-output dengan melakukan simulasi berdasarkan strategi kebijakan ekonomi yang dipilih untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi. Data yang digunakan di dalam kajian ini adalah data sekunder dari publikasi BPS dan Lembaga lainnya seperti PUSLITFO BNP2TKI.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab tingginya TPT adalah karena tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi Kota Banjarmasin yang menjadi pusat aglomerasi ekonomi menjadi daya tarik bagi pencari kerja. Selain itu, terdapatnya perbedaan tingkat upah antara Kota Banjarmasin dengan wilayah *hinterland* menjadi salah satu daya tarik para pencari kerja. Terbatasnya pekerjaan di pedesaan juga menjadi pendorong pencari kerja datang ke Kota Banjarmasin.

Analisis input-output digunakan untuk memperkirakan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di luar dugaan dari kajian ini untuk melihat terjadinya pengangguran karena terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Di dalam simulasi yang ringan, telah terjadi peningkatan pengangguran sekitar 21 ribu orang. Berdasarkan strategi untuk mencapai pertumbuhan yang bisa menciptakan kesempatan kerja pasca pandemi atau pandemi sudah dapat dikendalikan sesuai standar WHO, maka strategi yang dipilih adalah memacu pertumbuhan sektor-sektor andalan berdasarkan multiplier kesempatan kerja dengan tabel Input-output supaya bisa tumbuh di atas rata-rata target pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin. Sektor-sektor yang dijadikan andalan untuk menciptakan kesempatan kerja adalah multiplier tinggi dan memiliki peran yang dominan di dalam perekonomian yaitu sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Restoran dan Hotel, Angkutan dan Logistik serta sektor Jasa yang lain.

Hasil simulasi dari strategi yang dipilih ternyata memberikan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar sehingga diharapkan dapat menyerap pengangguran terbuka akibat pandemi dan membantu menyerap pencari kerja baru dan para penganggur yang belum dapat pekerjaan.

Kata Kunci : TPT, mutliplier, simulasi, tabel input output, Kota Banjarmasin

ABSTRACT

The objective of the study is to examine the causes of open unemployment in Banjarmasin, analyzing sectors that have high job opportunity multipliers, and simulating and projecting sectors capable of absorbing unemployment. The rate of open unemployment in Banjarmasin is the highest rate in South Kalimantan Province. However, this rate is lower than of that the national level. Open unemployment usually is regarded as the performance of an economy of a region. Therefore, most of policy makers try to reduce open unemployment rate in their regions.

This study uses descriptive statistical method to explain the phenomenon that causes high TPT and to make policy recommendations, input-output analysis is used by conducting simulations based on the chosen economic policy strategy to create high employment opportunities. The data used in this study are secondary data from the publications of BPS and other institutions such as PUSLITFO BNP2TKI.

The results of this research show that the cause of the high open unemployment is due to the mismatch between the demand and supply of available job opportunities. The city of Banjarmasin, which is the center of economic agglomeration, is very attractive for job seekers. In addition, the wage difference levels between the city of Banjarmasin and the hinterland area is one of the attractions of job seekers. Limited jobs in rural areas also motivate job seekers to come to Banjarmasin City.

The input-output analysis is used to estimate the impact of the Covid-19 pandemic which occurred beyond the expectations of this study to see the unemployment due to the plunge of economic growth. In the simulation, there has been an increase in unemployment of around 21 thousand people. In the post-pandemic or pandemic is under controlled by WHO standard, the strategy chosen to achieve high growth that can create high employment creation is to opt high employment multiplier of the sectors in the Input-output table. These sectors should have economic growth above the target of average of economic growth in the city of Banjarmasin. The sectors that high multipliers and have a dominant role in the economy, are the Manufacturing, Trade, Restaurant and Hotel, Transportation and Logistics sector and other service sectors.

The simulation shows that the job creation is large. Therefore, job opportunity creation is expected to absorb the unemployment rate due to the pandemic and help absorb new job seekers and unemployed people who have not been able to work.

Keyword: open unemployment, mutliplier, simulation, input output table, Banjarmasin city

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR PETA	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Permasalahan.....	19
1.3 Tujuan Kajian.....	20
1.4 Output Kajian	20
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	21
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Pengangguran di Perkotaan	21
2.2.1 Pengangguran Terbuka di Indonesia	21
2.2.2 Pengangguran Terbuka di Negara-Negara Berkembang.....	22
2.2.3 Pengangguran Terbuka di Negara-negara Maju	23
2.3 Ekonomi Aglomerasi, Migrasi, dan Pengangguran	25
2.3.1 Tren Populasi di Perkotaan dan Ekonomi Aglomerasi	25
2.3.2 Migrasi Penduduk Desa ke Kota	27
2.4 Mengurangi Pengangguran Terbuka di Perkotaan	31
2.4.1 Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian di Pedesaan	31
2.4.2 Mengembangkan Sektor Kunci Penyerap Tenaga Kerja di Perkotaan.....	32
2.5 Kesimpulan	33
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.	34
3.2 Jenis Data	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Teknik Analisis Data	34

3.4.1 Analisis Deskriptif.....	35
3.4.2 Analisis Elastisitas.....	35
3.4.3 Analisis Input-Output.....	35
3.5 Waktu Penelitian.....	37
BAB 4 PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Kota Banjarmasin.....	38
4.1.1 Pendahuluan.....	38
4.1.2 Kondisi Ekonomi Kota Banjarmasin	39
4.1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin	45
4.1.4 Kesimpulan	49
4.2 Kesempatan Kerja Di Kota Banjarmasin	49
4.2.1 Pendahuluan	49
4.2.2 Pengangguran dan Penyebabnya	50
4.2.3 Hasil Identifikasi Sektor Pencipta Kesempatan Kerja	57
4.2.4 <i>Postscript</i> Dampak Pandemi Covid 19	63
4.2.5 Simulasi Sisi Permintaan.....	64
4.2.6 Strategi Penciptaan Kesempatan Kerja Pasca Pandemi	65
4.2.7 Strategi Penciptaan Kerja	66
4.2.8 Simulasi Penciptaan Kesempatan Kerja	68
4.2.9 Kesempatan Kerja di Luar Negeri	69
4.2.10 Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Peluang/Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	75
4.2.11 Kesimpulan	75
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Alokasi Waktu Kegiatan	37
Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Banjarmasin 2017 - 2019 (Juta Rupiah)	39
Tabel 3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarmasin 2011 - 2019 (Persen).....	41
Tabel 4 PDRB dan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarmasin 2015 - 2019	43
Tabel 5 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Banjarmasin 2019 (Persen)	44
Tabel 6 Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin 2010 – 2019	46
Tabel 7 Kontribusi Tenaga Kerja dan PDRB Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Banjarmasin Tahun 2014 - 2018.....	58
Tabel 8 Pertumbuhan Tenaga Kerja, PDRB dan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor di Banjarmasin Tahun 2014 – 2018.....	60
Tabel 9 Multiplier Kesempatan Kerja Perekonomian Kota Banjarmasin.....	63
Tabel 10 Dampak Simulasi Covid 19 Terhadap Kesempatan Kerja Kasus Ringan	65
Tabel 11 Dampak Simulasi Covid-19 Terhadap Kesempatan Kerja Kasus Moderate	65
Tabel 12 Asumsi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Riil Tahun 2020-2024	66
Tabel 13 Penyerapan Kesempatan Kerja Sesuai Dengan Strategi Pertumbuhan Sektor Andalan 2020-2024	69
Tabel 14 Peluang Kerja di Berbagai Negara.....	73
Tabel 15 Potensi PMI berdasarkan Jumlah Mahasiswa dan Siswa tahun 2019....	74

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	15
Grafik 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Agt 2017- Agt 2019.....	16
Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Agt 2017- Agt 2019G60.....	17
Grafik 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Agt 2017- Agt 2019.....	18
Grafik 5 Penduduk Bekerja berdasarkan Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan	19
Grafik 6 Persentase Industri Manufaktur Menengah dan Besar Kota Banjarmasin, Tahun 2019	39
Grafik 7 PDRB Kabupaten/Kota (dalam %) Pada Perekonomian Kalimantan Selatan 2019.....	40
Grafik 8 Share (%) Sektoral dalam PDRB (ADHB) Kota Banjarmasin 2019.....	42
Grafik 9 Persentase Penduduk Miskin Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2019	45
Grafik 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2019 (dalam Persen).....	47
Grafik 11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin, 2009-2019.....	48
Grafik 12 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarmasin	51
Grafik 13 Estimasi Migrasi Netto Kota Banjarmasin 2011-2018 dengan CDR 5,5 dan 6,5.....	52
Grafik 14 Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarmasin Dan Daerah Penyangga Tahun 2010 – 2018	54
Grafik 15 Perbedaan Upah Buruh Tani di Kalsel dan UMP di Kalsel 2010-2018 (Rupiah)	56
Grafik 16 Perbedaan Upah dan Migrasi.....	57
Grafik 17 Multiplier Kesempatan Kerja 9 Sektor Perekonomian Kota Banjarmasin	63
Grafik 18 Jumlah Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.....	70
Grafik 19 Tingkat Pendidikan PMI Kalimantan Selatan Tahun 2019	70
Grafik 20 Negara Penempatan PMI Kalimantan Selatan 2017-2019	71

DAFTAR PETA

Hal

Peta 1 Pertumbuhan Penduduk 2016-2019 dan Jumlah Penduduk 2019 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	51
--	----

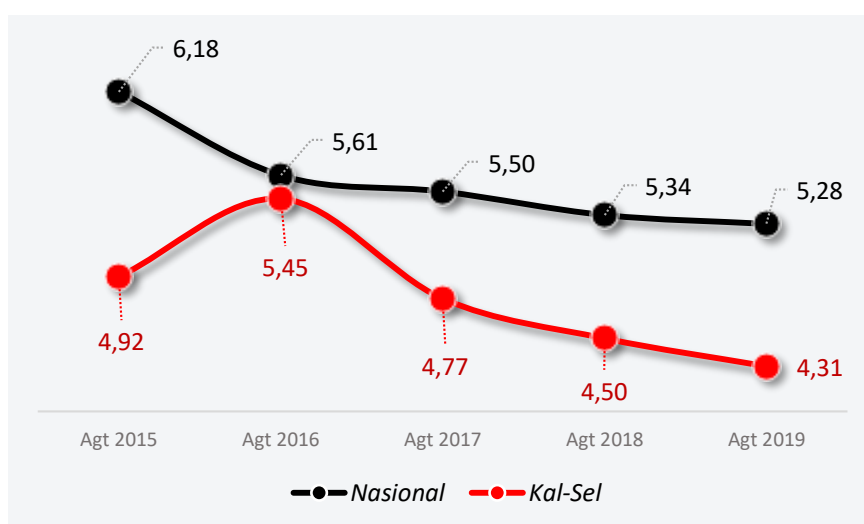
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang selalu dijadikan rujukan mengenai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kondisi pengangguran terbuka selalu diupayakan rendah atau memiliki kecenderungan menurun. Tingginya angka pengangguran terbuka akan menjadi masalah besar bagi suatu Negara atau pemerintah daerah, karena bila angka pengangguran yang tinggi akan memberikan potensi pada tingkat kriminalitas, kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Jadi isu tingkat pengangguran terbuka selalu menjadi topik yang hangat bagi setiap pemerintahan dan sering menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan. Dengan demikian, tiap pemerintah akan berupaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di daerahnya.

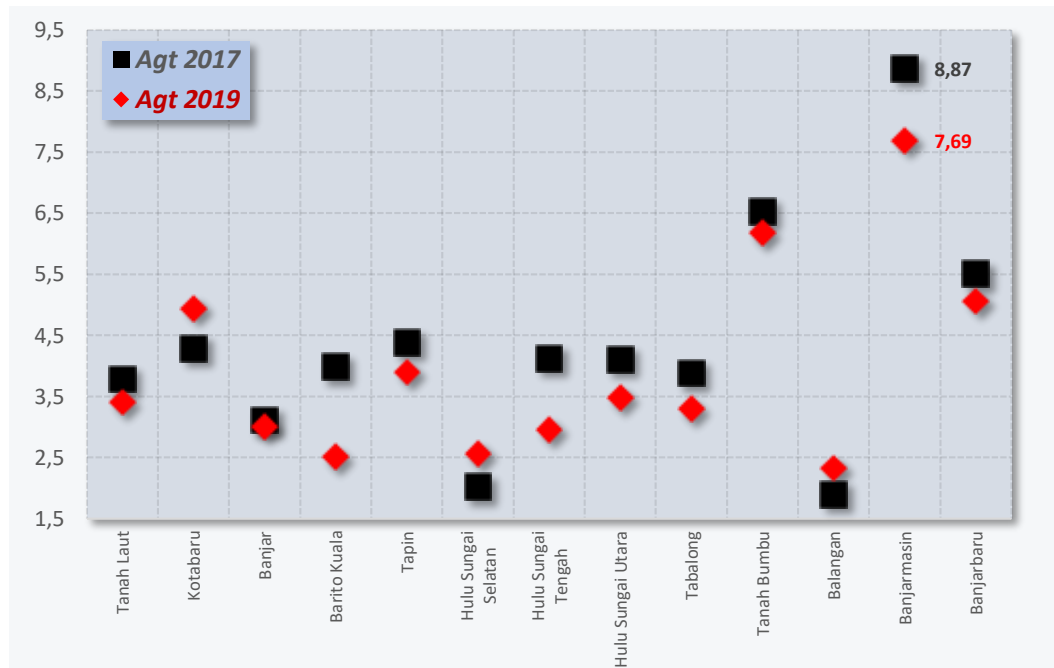
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan tahun 2015 hingga bulan Agustus 2019 menunjukkan *trend* yang terus menurun. Kondisi ini menunjukkan perbaikan dan bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran dengan di tingkat nasional, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah yaitu sebesar 4,31 persen dibandingkan dengan 5,28 persen pada tingkat nasional.



Grafik 1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : Profil TK Provinsi Kalsel Februari 2019 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019) dan Berita Resmi statistik

Pengangguran memiliki berbagai penyebab, sehingga di dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran, perlu dicari penyebab pengangguran tersebut. Tingkat pengangguran terbuka di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan sangat bervariasi, di mana Kota Banjarmasin merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Balangan pada tahun 2019 (lihat Grafik di bawah).



Grafik 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Agt 2017- Agt 2019

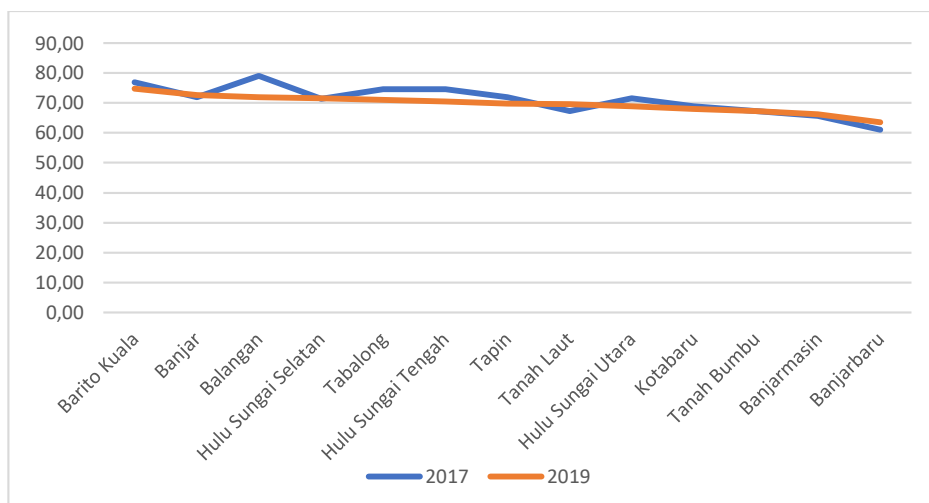
Sumber: Profil TK Provinsi Kalsel Februari 2019 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019) dan Berita Resmi Statistik

Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Banjarmasin salah satu penyebabnya adalah karena sebagai ibukota provinsi, biasanya menjadi pusat kegiatan yang berkembang pesat dan pusat aglomerasi sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja. Sebagai kota yang menjadi ibukota dan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berkembang pesat umumnya memberikan peluang kerja yang lebih besar sehingga mendorong migrasi desa-kota (Todaro & Smith, 2012). Menurut Todaro & Smith (2012), Turok & McGranahan (2013) pengangguran di kota cenderung lebih tinggi dari di desa, karena daya serap dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan tidak sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Imansyah et al. (2019) dalam kajian empirisnya menunjukkan bahwa bahwa urbanisasi akan meningkat seiring tingginya migrasi desa-kota, sehingga

meningkatkan pengangguran di kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Harris & Todaro (1970) di mana migrasi desa-kota terjadi, karena adanya perbedaan tingkat upah.

Pengangguran terbuka lebih banyak ditemukan pada daerah perkotaan daripada di pedesaan yang dicerminkan banyaknya orang berpendidikan di desa migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan (Effendi, 1992). Effendi (1992) juga menambahkan bahwa orang berpendidikan lebih tinggi tidak mau bekerja di sektor pertanian, dan di kota mereka bersedia menunggu hingga mendapatkan pekerjaan, sehingga pengangguran terbuka di perkotaan menjadi tinggi. Selain itu, rendahnya kemampuan sektor industri di perkotaan dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai menjadi penyebab pengangguran di kota.

Penawaran tenaga kerja di Kota Banjarmasin dapat diketahui dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. TPAK berguna untuk mengetahui potensi tenaga kerja di suatu wilayah. Pada tahun 2019 Kota Banjarmasin berada pada 2 terbawah dalam TPAK dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini memberikan indikasi penawaran tenaga kerja di Kota Banjarmasin lebih kecil dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi daya tarik bagi orang untuk datang mengadu mencari pekerjaan di Kota Banjarmasin.

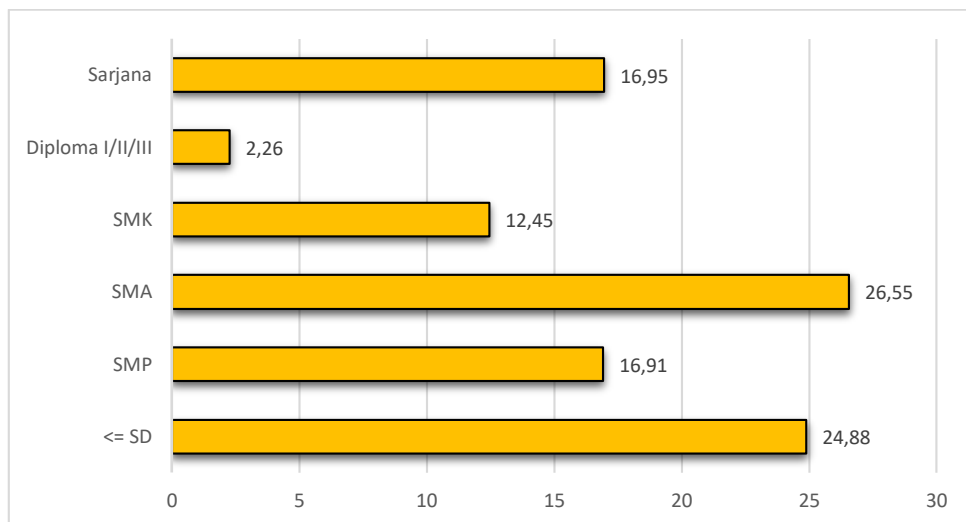


Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Agt 2017- Agt 2019

Sumber: Profil TK Provinsi Kalsel Februari 2019 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019) dan Berita Resmi Statistik

Kota Banjarmasin sebagai daerah perkotaan seperti daerah perkotaan lainnya, memungkinkan banyak kegiatan yang bisa menghasilkan uang tidak seperti di daerah pedesaan, misalnya menjual jasa dan kegiatan ekonomi lainnya yang di daerah pedesaan terbatas permintaan akan barang dan jasa karena jumlah penduduk sedikit. Sementara di perkotaan justru sebaliknya yaitu pekerjaan di sektor informal berkembang, karena sektor informal ini memiliki kelebihan yaitu keluwesan dalam menampung tenaga kerja tanpa persyaratan pendidikan dan keahlian seperti di sektor formal.

Pendidikan pekerja di Kota Banjarmasin tahun 2018 didominasi oleh lulusan SMA 26,55% dan SD ke bawah 24,88%, sedangkan lulusan sarjana dan diploma hanya 16,95% dan 2,26%. Hal ini mengindikasikan beberapa hal yakni mutu tenaga kerja yang bekerja di Kota Banjarmasin relatif rendah, atau permintaan tenaga kerja memang di level pendidikan tersebut tidak mencukupi dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Kota Banjarmasin, sehingga pada tingkat pendidikan tertentu yaitu level Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang bekerja sedikit.

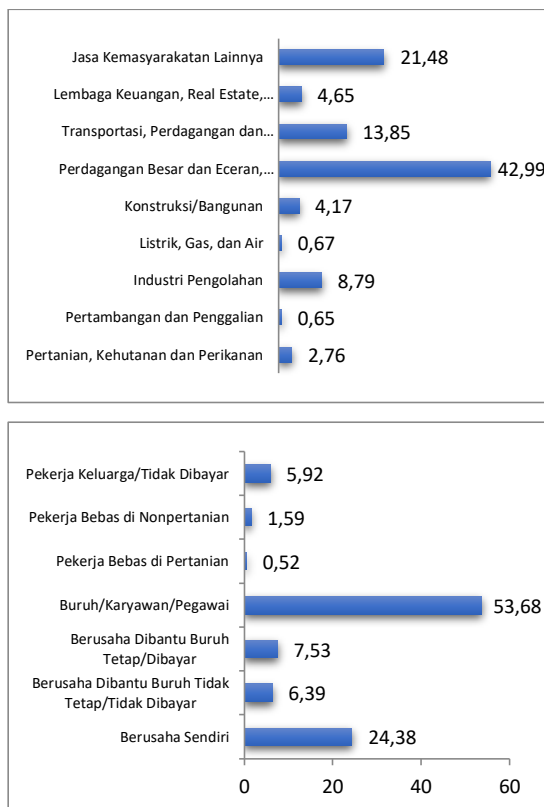


Grafik 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Agt 2017- Agt 2019

Sumber: Profil Tenaga Kerja Kota Banjarmasin 2018 (BPS Kota Banjarmasin, 2019)

Pekerja di Kota Banjarmasin didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan dan Hotel dengan jumlah 42,99 persen. Di Kota Banjarmasin, 53,68 persen bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan dan Hotel termasuk sektor yang rentan terhadap gejolak perekonomian daerah, sehingga ketika terjadi pelambatan dalam perekonomian daerah maka akan sangat berdampak pada penduduk yang bekerja di sektor ini. Apalagi jika tempat mereka bekerja memutuskan harus melakukan rasionalisasi pegawai melalui PHK, maka hal ini akan memicu tingginya TPT di Kota Banjarmasin.



Grafik 5 Penduduk Bekerja berdasarkan Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan
 Sumber: Profil Tenaga Kerja Kota Banjarmasin 2018 (BPS Kota Banjarmasin, 2019)

Kuatnya daya tarik Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi, rentannya lapangan usaha dan sektor ekonomi terhadap perubahan kondisi perekonomian, *mismatch supply* dan *demand* tenaga kerja, maka tingkat pengangguran yang tinggi menjadi kajian yang sangat penting sehingga dapat diketahui penyebabnya. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan dapat dibuat berdasarkan hasil kajian ini.

1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam kajian tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab TPT di Kota Banjarmasin tinggi?
2. Sektor–sektor ekonomi apa yang bisa jadi prioritas penyerap lapangan kerja potensial?
3. Bagaimana strategi untuk menurunkan TPT di Kota Banjarmasin?
4. Apa yang ingin dicapai terkait penurunan TPT untuk Kota Banjarmasin periode 2021 – 2025?

1.3 Tujuan Kajian

Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Penyebab Tingginya TPT di Kota Banjarmasin
2. Menganalisis sektor yang dijadikan prioritas dalam rangka menyerap tenaga kerja.
3. Menentukan strategi yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah TPT di Kota Banjarmasin
4. Mensimulasi dan memprediksi capaian terhadap penurunan TPT di Kota Banjarmasin Periode 2021-2025

1.4 Output Kajian

Output kajian ini adalah tersusunnya Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarmasin, dengan pembahasan tentang :

1. Identifikasi penyebab tingginya TPT di Kota Banjarmasin
2. Analisis sektor yang memiliki *multiplier* kesempatan kerja yang tinggi sebagai penyerap pengangguran
3. Membuat simulasi dan memprediksi capaian terhadap penurunan TPT di Kota Banjarmasin Periode 2021-2025
4. Rekomendasi Kebijakan untuk mengatasi TPT yang tinggi di Kota Banjarmasin.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang selalu menjadi bahasan menarik, karena tingkat pengangguran akan selalu menjadi momok di dalam perekonomian. Oleh karena itu, berbagai penelitian mengenai pengangguran dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab tingginya tingkat pengangguran. Fenomena pengangguran di berbagai negara memiliki fenomena yang khas, yaitu untuk negara berkembang dan negara maju berbeda karakteristiknya. Bagian berikut akan membahas pengangguran terbuka di perkotaan di Indonesia, negara berkembang dan negara maju.

2.2 Pengangguran di Perkotaan

2.2.1 Pengangguran Terbuka di Indonesia

Kondisi pengangguran terbuka lebih banyak ditemukan pada daerah perkotaan daripada di pedesaan. Hal ini diindikasikan bahwa orang yang memiliki pendidikan di desa migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan karena keengganan bekerja di desa pada sektor pertanian. Para pencari kerja di kota bersedia menunggu hingga mendapatkan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran terbuka di perkotaan menjadi tinggi (Effendi, 1992). Pada tahun 1993 perbandingan pengangguran terbuka di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sektor industri di perkotaan menyediakan kesempatan kerja yang memadai (Mardianto & Syafa'at, 1998). Kondisi ini berbeda dengan di daerah pedesaan, ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan maka mereka dapat membantu usaha keluarga di sektor pertanian meskipun produktivitas rendah dan tidak dibayar namun keadaan ini dapat mengurangi angka pengangguran terbuka karena mereka dianggap sebagai pekerja.

Tingginya pengangguran terbuka di perkotaan tersebut disebabkan oleh kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi yang mengakibatkan sektor non pertanian harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering

dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Pada akhir-akhir ini tingginya pengangguran terbuka di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh migrasi saja, namun ada faktor penyebab lain seperti laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, upah, pendidikan, investasi, inflasi dan pengeluaran pemerintah (Putri, 2016; Imsar, 2018; Kasanah et al., 2018; Muslim, 2014; Siarait et al., 2018).

2.2.2 Pengangguran Terbuka di Negara-Negara Berkembang

Penyebab tingginya pengangguran terbuka di negara-negara berkembang cenderung mempunyai kemiripan. Pengangguran di Bangladesh memiliki tren menurun sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2020. Namun, di Bangladesh pada tahun 2010 jumlah pengangguran 3 kali lebih banyak di daerah pedesaan di bandingkan daerah perkotaan. Penggunaan teknologi di sektor pertanian, penggunaan mesin seperti traktor dan mesin penggiling padi sebagai pengganti tenaga hewan dan manusia ditengarai mengurangi kesempatan bekerja pada sektor pertanian di pedesaan (Ahmed & Khan, 2015). Menurut Chowdhury & Hossain, (2014) bahwa salah satu penyebab pengangguran di Bangladesh adalah migrasi dari area pedesaan ke daerah perkotaan karena adanya perubahan teknologi dalam sektor pertanian. Selain itu struktur demografi dan kondisi ekonomi juga merupakan penyebab tingginya angka pengangguran. Inflasi dan PDB mempengaruhi pengangguran di Bangladesh (Chowdhury & Hossain, 2014).

India merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah Tiongkok yaitu lebih dari 1,3 milyar jiwa. Upadhy & Unnikrishnan (2017) menjelaskan bahwa 2 (dua) penyebab utama pengangguran yaitu, *pertama*, masalah sosial dengan meningkatnya jumlah penduduk di India. *Kedua*, kebijakan pemerintah yang salah seperti dalam mengatasi inflasi dan lain-lain. Kumar (2016) membagi beberapa tipe pengangguran di India, yaitu (1) *Open Unemployment* (2) *Disguised Unemployment* (3) *Seasonal Unemployment* (4) *Cyclical Unemployment* (5) *Educated Unemployment* (6) *Technolgical Unemployment* (7) *Structural Unemployment* dan (8) *Underemployment*. Adapun

penyebab pengangguran di India adalah sistem pendidikan yang terlalu teoritis, kurangnya lapangan pekerjaan pada sektor industri, kurangnya peluang alternatif bagi petani, rendahnya kualitas industri rumahan, tingginya pertumbuhan penduduk, rendahnya produktivitas di sektor pertanian, kegagalan perencanaan ekonomi dan produksi mesin dalam skala besar.

Subramaniam & Baharumshah (2011) dalam tulisannya menjelaskan bahwa penyebab tingginya pengangguran di Filipina adalah ketersediaan lowongan pekerjaan, investasi luar negeri, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan inflasi. Kebijakan pada pasar tenaga kerja dan menjaga kestabilan politik dimungkinkan efektif untuk mengatasi masalah pengangguran di Filipina. Urrutia et al., (2017) menjelaskan pada awalnya sektor penyerap tenaga kerja di Filipina adalah Sektor Industri, Pertanian, dan Jasa yang mampu menyerap 50 persen tenaga kerja. Namun, karena tingginya pertumbuhan penduduk membuat jutaan masyarakat Filipina mencari pekerjaan dan melakukan migrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari upah yang tinggi. Adapun penyebab rendah tingginya pengangguran di Filipina adalah tingkat angkatan kerja, jumlah penduduk, PDRB, dan PNB.

Abdullah et al., (2014) menjelaskan jumlah penduduk di Malaysia meningkat dengan cepat sehingga menyebabkan migrasi dari pedesaan ke perkotaan khususnya ke kota yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan, jasa sosial, dan lain-lain yang mendorong migrasi dari pedesaan. Migrasi desa-kota menjadi faktor utama tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan di pedesaan dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Faktor lain, Furuoka & Munir (2014) mengidentifikasi hubungan inflasi dengan pengangguran menggunakan Kurva Philips yang ditemukan oleh William Phillips pada tahun 1958. Dengan menggunakan *Error Corection Model* ditemukan bahwa terdapat hubungan ekuilibrium antara tingkat pengangguran dan inflasi di Malaysia, artinya hasil penelitian mendukung validitas hipotesis Kurva Phillips.

2.2.3 Pengangguran Terbuka di Negara-negara Maju

Jepang adalah negara sejahtera yang penduduknya berada dalam kondisi *full employment* dengan konsep *welfare via job*. Jika terjadi pengangguran maka

pemerintah akan melakukan kebijakan terhadap kaum muda dengan melakukan stimulus terhadap *supply* dan *demand* hingga pengangguran dapat teratasi. Jika sudah teratasi maka pemerintah akan *concern* kepada kelompok penting selanjutnya dalam pasar tenaga kerja yaitu kaum wanita, orang tua dan disabilitas. Jelas terlihat bahwa pemerintah Jepang melakukan penanganan pengangguran dengan menggunakan kelompok penduduk dan usia yang berbeda dimulai dari penduduk yang memiliki sifat responsif terhadap kebijakan yaitu kaum muda (Ohtake, 2012; Shuryhina, 2017; Taira, 2006).

Menurut Kitov (2006) pengangguran dapat diatasi dengan mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyebab pengangguran di Amerika Serikat adalah krisis ekonomi terakhir pada tahun 2008, namun pada pertengahan tahun lalu pengangguran di Amerika Serikat berada pada titik terendah sejak tahun 1969. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah dengan menurunkan pajak dan menjaga perubahan nilai tukar riil sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Frenkel & Ros, 2006).

Jerman adalah negara maju yang berhasil mengurangi tingkat pengangguran dengan beberapa kebijakan dari pemerintahnya. Menurut Plecher (2020), sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, telekomunikasi dan pariwisata. Lebih dari seperempat penduduk Jerman tinggal di daerah perkotaan dan mendorong perkembangan dalam sektor jasa tersebut.

Negara maju seperti Australia juga terdapat pengangguran, namun pengangguran di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan yang disebabkan oleh masyarakat pedesaan tidak mempunyai *skill* atau *skill* yang rendah sedangkan permintaan untuk pekerja yang tidak mempunyai *skill* di Australia sudah menurun sejak beberapa tahun terakhir. Selain itu, ketimpangan pendapatan sangat jelas terlihat antara masyarakat di pedesaan dengan perkotaan yang disebabkan oleh terbatasnya sektor penerima tenaga kerja di pedesaan, yaitu hanya sektor pertanian dan mineral di mana pendapatan dari sektor ini tidak menentu dan tidak adanya globalisasi dalam pertanian (Falk, 2001).

2.3 Ekonomi Aglomerasi, Migrasi, dan Pengangguran

2.3.1 Tren Populasi di Perkotaan dan Ekonomi Aglomerasi

PBB (2019) dalam laporannya yang berjudul *World Urbanization Prospects (The 2018 Revision)* menyebutkan jumlah penduduk dunia yang tinggal di daerah perkotaan (*urban*) lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan (*rural*), jumlahnya mencapai 55 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 1950 di mana populasi yang tinggal di kota hanya sekitar 30 persen. Diperkirakan penduduk kota secara global akan meningkat menjadi 68 persen pada 2050, di mana negara-negara yang pada saat ini dikategorikan ke dalam negara berpendapatan menengah ke bawah akan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk kota paling cepat dibanding negara kelompok pendapatan lainnya pada masa yang akan datang.

Tren semakin besarnya jumlah penduduk di kota dibanding dengan di desa juga terjadi di Indonesia. Menurut proyeksi BPS (2014) pada tahun 2020 jumlah penduduk di perkotaan hampir mencapai 57 persen dari jumlah penduduk dan sekitar 67 persen pada tahun 2035. Besaran proporsi populasi daerah perkotaan Indonesia pada tahun 2020 tersebut serupa dengan kondisi Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1950-an. Kondisi Indonesia berdasarkan proyeksi tahun 2035 mirip dengan keadaan di Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1970-an (United Nations, 2019).

Semakin besarnya jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk di kota lebih tinggi dari daerah pedesaan. Pada periode 2010-2015 laju pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih besar 0,17 persen dibanding di pedesaan dan kemudian meningkat lagi menjadi 0,18 persen pada 2015-2020. Selanjutnya, pada periode 2030-2035 perbedaan pertumbuhan penduduk kota dengan desa diproyeksikan semakin besar, yaitu mencapai 0,21 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).

Fenomena semakin terkonsentrasinya penduduk di kota tidak lepas dari ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*), yaitu berkumpulnya (*co-location*) industri dan kegiatan ekonomi di kota. Pada dasarnya pemusatan tersebut terjadi karena kegiatan ekonomi akan menjadi lebih efisien jika berhimpun pada lokasi yang sama atau berdekatan. Smith (1776), von Thunen (1825) dan Marshall (1890) sebagaimana dipetik Edward L. & Gottlieb D. (2009) menekankan konsentrasi

kegiatan ekonomi tersebut untuk menurunkan biaya transportasi. Krugman (1991) menggarisbawahi penurunan biaya transportasi adalah salah satu cara untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*).

Skala ekonomi terjadi ketika biaya produksi rata-rata suatu industri mulai menurun seiring dengan semakin besarnya output yang dapat dihasilkan. Salah satu syarat untuk mencapai skala ekonomi adalah jika industri tersebut beroperasi dalam skala besar (Pindyck & Rubinfeld, 2018). Namun berproduksi dalam skala besar hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Adapun perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (*small and medium enterprises*) dapat mencapai skala ekonomi eksternal (*external economies of scale*) dengan memanfaatkan kondisi eksternal yang mendukung efisiensi produksi mereka yaitu dengan berada dalam lokasi yang berdekatan (*cluster*). Untuk mencapai skala ekonomi dan biaya transportasi yang rendah, industri juga perlu mendekati atau ada di wilayah yang memiliki potensi permintaan tinggi (Krugman, 1991; Todaro & Smith, 2012).

Oleh karena itu, ekonomi aglomerasi ini tidak dapat dilepaskan dari teori lokasi, yaitu teori yang menyatakan di mana seharusnya suatu kegiatan ekonomi beroperasi. Sebagaimana diungkapkan Gorter & Nijkamp (2015), teori lokasi berkembang dari sekedar bagaimana menentukan lokasi pertanian (Von Thünen, 1842) dan industri (Weber, 1909) di mana ekonomi menjadi ke arah aglomerasi (Marshall, 1925; Christaller, 1933; Lösch, 1954), sedangkan Krugman (1991) mengembangkan model bagaimana hubungan perdagangan dengan lokasi dan pengklusteran secara geografis.

Lalu di manakah letak hubungan tingginya populasi kota dengan ekonomi aglomerasi? Seperti dijelaskan di atas, salah satu unsur utama yang mendorong perkembangan ekonomi aglomerasi adalah faktor permintaan yang tinggi (*high demand*). Oleh karena itu, ekonomi aglomerasi cenderung terjadi di wilayah yang populasinya tinggi untuk menopang permintaan sekaligus meminimalisir biaya transportasi. Aglomerasi kegiatan ekonomi di kota juga menciptakan banyak lapangan kerja sehingga menarik penduduk dari daerah atau desa untuk bekerja dan tinggal di kota. Inilah yang menyebabkan terjadinya urbanisasi dan semakin besarnya populasi kota. Dengan kata lain tren semakin besarnya populasi kota

beriringan dengan perkembangan aglomerasi ekonomi (Edward L. & Gottlieb D., 2009; Krugman, 1991; Todaro & Smith, 2012; Viladecans-Marsal, 2004).

Di sisi lain, suatu kota yang sedang berkembang juga memiliki keterbatasan lahan, baik untuk lokasi kegiatan industri, perdagangan dan jasa maupun untuk pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan semakin tingginya harga tanah, biaya sewa bangunan dan tempat tinggal sehingga dapat menaikkan biaya tetap (*fixed cost*) suatu industri dan beban hidup para pekerja yang tinggal di kota. Kondisi ini kemudian memicu perkembangan kota meluas melebihi batas wilayah administrasinya (*metropolitant city*). Industri akan menggeser (*relocation*) sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke daerah pinggiran kota (*peripheral city*). Begitu pula terdapat penduduk yang semula tinggal di dalam kota memilih lokasi pemukiman di luar kota dan pendatang dari daerah yang ingin bekerja di kota juga dapat memilih tempat tinggal di daerah pinggiran. Jadi suatu kota yang berkembang akan mendorong berkembangnya daerah penyangga (*hinterland*) dengan syarat utama adanya konektivitas antara kota dengan daerah penyangga (Henderson & Wang, 2005; Rupasingha & Marré, 2020; Todaro & Smith, 2012; Viladecans-Marsal, 2004; World Bank, 2009).

2.3.2 Migrasi Penduduk Desa ke Kota

Perpindahan penduduk dari daerah atau desa ke kota baik untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan alasan lainnya adalah bagian dari proses urbanisasi (*urbanization*). Adapun pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya dalam satu negara, termasuk perpindahan dari desa ke kota disebut migrasi internal (*internal migration*). Pergerakan penduduk dapat dikategorikan sebagai migrasi internal jika mereka menetap di daerah yang baru paling sedikit selama 12 bulan (Sukamdi & Mujahid, 2015). Migrasi penduduk permanen terbagi atas dua tingkatan, yaitu migrasi seumur hidup (*lifetime migration*) dan penduduk yang tercatat domisilinya saat ini berbeda dengan lima tahun lalu atau disebut migrasi risen (*recent migration*). Sementara itu migrasi dianggap tidak permanen jika perpindahan penduduk kurang dari enam bulan yang disebut migrasi sirkuler (*circular migration*) dan kurang dari satu hari yang dinamakan migrasi ulang-alik atau komuter (*commuting migration*) (Badan Pusat Statistik, 2019).

Migrasi penduduk dari desa ke kota pada umumnya dipicu oleh faktor ekonomi. Kondisi ini berawal dari surplus tenaga kerja (*labour surplus*) yang dialami daerah pedesaan sebagai akibat kurang produktifnya dan terbatasnya lahan pertanian. Sementara lapangan kerja lebih banyak tersedia di daerah perkotaan dengan tingkat upah (*wage rate*) yang lebih tinggi dari desa. Hal ini digambarkan dalam model Todaro bahwa keputusan penduduk desa untuk bermigrasi ke kota adalah berdasarkan pertimbangan pilihan ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (*expected income*) dibanding jika hanya tinggal di desa (Todaro & Smith, 2012). Dengan demikian gambaran peluang ekonomi dan pendapatan yang lebih baik di kota merupakan faktor penarik (*pulled factor*) terjadinya migrasi dari desa. Sebelumnya Harris dan Todaro (1970) juga menekankan migrasi desa-kota terjadi sebagai akibat perbedaan sektor ekonomi antara desa yang berbasis pertanian dengan kota yang berbasis industri yang menimbulkan perbedaan tingkat upah.

Kurang produktifnya pertanian di desa menimbulkan masalah kemiskinan dan menjadi faktor pendorong (*pushed factor*) migrasi ke kota. Mengapa sektor pertanian tidak produktif? Keterbatasan lahan dan lemahnya adopsi teknologi adalah problem utama pertanian di negara-negara berkembang sehingga sulit mencapai skala ekonomi (Todaro & Smith, 2012). Apalagi untuk kasus pertanian di Indonesia para petani pada umumnya adalah buruh tani bukan pemilik lahan (petani *gurem*). Sebagai gambaran perbandingan rata-rata lahan pertanian yang dimiliki seorang petani di negara-negara berkembang dengan negara-negara maju sangat timpang. Petani Indonesia misalnya rata-rata memiliki lahan seluas 0,30 hektar pada tahun 2005, sementara itu petani China hanya memiliki lahan 0,16 hektar, Bangladesh 0,30 hektar, dan Nigeria 11,20 hektar. Terlebih lagi petani di negara maju seperti AS rata-rata memiliki lahan dengan luas 20 hektar, Australia 45 hektar, dan Kanada 47 hektar (World Bank, 2009).

Apakah betul terjadi migrasi penduduk desa-kota di Indonesia? *Pertama*, ini bisa dilihat dari perubahan komposisi penduduk daerah pedesaan dan perkotaan. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, jumlah penduduk kota telah melampaui penduduk desa dengan kecenderungan populasi kota akan terus meningkat. *Kedua*, penduduk yang bekerja di sektor pertanian semakin menyusut dari semula sebanyak

65,90 persen pada tahun 1971 menjadi 38,40 persen pada tahun 2010. Sebaliknya, penduduk yang bekerja di sektor industri naik dari 10,10 persen menjadi 19,30 persen dan yang bekerja di sektor jasa naik dari 24,10 persen menjadi 42,30 persen. *Ketiga*, proporsi populasi penduduk migran seumur hidup di perkotaan lebih besar, yaitu 17,20 persen dari populasi kota berbanding 6,40 persen migran yang tinggal di pedesaan pada tahun 2010 (Jones & Mulyana, 2015). Sementara itu dari 4,16 juta pekerja migran risen pada tahun 2018, hampir 65 persen di antaranya tinggal di kota yang mengindikasikan mereka adalah pendatang dari desa (Badan Pusat Statistik, 2019).

Meskipun faktor ekonomi merupakan alasan utama penduduk bermigrasi ke kota, namun pada masa kini peluang pindah lebih tinggi untuk warga desa yang muda dan lebih terdidik (*well-educated*) dibandingkan dengan yang tidak terdidik (Todaro & Smith, 2012). Ini diindikasikan dari data Sensus Penduduk 2010 yang menunjukkan hampir 65 persen penduduk migran adalah dari kelompok umur 15-34 tahun, dan lebih dari 58 persen penduduk migran usia kerja 15-64 tahun berpendidikan SMU ke atas di mana 14 persen di antaranya bergelar diploma dan sarjana, serta hanya 16 persen lebih tamatan SD (Sukamdi & Mujahid, 2015).

Data terbaru dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 juga menunjukkan pelaku migrasi desa-kota lebih dominan dari kalangan terdidik. Sebagai contoh sebanyak 58 persen pekerjaan migran risen berpendidikan SMU ke atas dan 59 persen bekerja di sektor formal. Sedangkan untuk pekerja migran non permanen yang secara nasional terdiri atas 8,57 juta pekerja migran komuter dan 2,71 juta pekerja migran sirkuler sekitar 65 persennya berpendidikan SMU ke atas dan 79 persen bekerja di sektor formal. Hanya saja khusus pekerja migran sirkuler lebih dominan berpendidikan di bawah SMU yaitu sebanyak 64 persen. Ini mengindikasikan para pekerja migran sirkuler adalah para pekerja musiman yang meninggalkan desa ketika sedang tidak ada pekerjaan bertani. Hal ini tampak dari lapangan kerja paling utama adalah bidang konstruksi yang menyerap hampir 27 persen pekerja migran sirkuler di samping 55 persen lebih bekerja sebagai tenaga produksi, angkutan dan pekerja kasar (Badan Pusat Statistik, 2019).

Migrasi desa-kota berdampak pada pertumbuhan kota (*city growth*) dan aglomerasi tenaga kerja (*labour agglomeration*). Hanya saja menurut Glaeser,

Kolko & Saiz (2001) perkembangan tingkat harga rumah dapat tumbuh lebih tinggi dari tingkat upah. Dalam perkembangannya migrasi neto suatu kota juga dapat menjadi negatif. Penyebab utamanya adalah penduduk kota tersebut pindah untuk mendapatkan biaya perumahan yang lebih murah. Di Amerika Serikat misalnya, beberapa kota besar (*metropolitan city*) mengalami migrasi neto negatif, yaitu New York (-196.400 orang), Los Angeles (-119.138 orang), Chicago (-70.273 orang), San Fransisco (-42.826 orang), dan Miami (-26.651 orang). Umumnya migrasi tersebut pindah dari kota asal dalam radius maksimal 100 km (Moon, 2019).

Kasus migrasi neto negatif juga dialami Kota Jakarta sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut migrasi neto negatif Jakarta adalah 173.800 orang dan pada tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 247.500 orang. Fakta ini tidak menunjukkan bahwa tidak terjadi migrasi desa-kota atau urbanisasi. Sebab justru daerah perkotaan semakin meluas melewati batas administrasinya. Terjadi limpahan (*spillover*) penduduk dan kegiatan ekonomi dari Jakarta sebagai kota inti (*core city*) ke daerah pinggiran (*peripheral city*) yang meliputi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Hal ini dibuktikan oleh perbedaan perkembangan jumlah penduduk di Jakarta dan daerah penyangganya. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Jakarta adalah 8,22 juta dan pada tahun 2010 hanya bertambah menjadi 9,61 juta orang. Sebaliknya jumlah penduduk daerah penyangga yang semula adalah 5,43 juta orang pada tahun 1990 berlipat tiga menjadi 25,93 juta orang pada tahun 2010. Dalam periode 2000-2010, rata-rata pertumbuhan penduduk Jakarta hanya 1,40 persen saja setiap tahunnya sedangkan daerah penyangga sebesar 5,60 persen (Jones & Mulyana, 2015).

Kasus migrasi neto negatif ini memiliki relevansi dengan pekerja migran komuter yang disebut juga pekerja dengan mobilitas ulang-alik. Dikatakan ulang-alik karena pekerja tersebut meninggalkan domisilinya untuk bekerja di pusat kota pada pagi hari dan pulang kembali ke daerahnya pada sore atau malam hari. Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, jumlah pekerja migran komuter ini adalah pekerja migran paling tinggi dibandingkan dengan pekerja migran risen dan migran sirkuler. Mayoritas pekerja komuter relatif muda, 74 persen berpendidikan SMU ke atas, 83 persen lebih bekerja di sektor formal, 70 persennya adalah laki-laki, dan 75 persen bekerja di sektor perdagangan, industri

manufaktur, konstruksi, administrasi pemerintahan, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, dan penyediaan akomodasi dan rumah makan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Karena mayoritas pekerja komuter relatif muda maka umumnya kehidupan ekonomi mereka belum terlalu mapan sehingga mereka memilih untuk tinggal di daerah penyangga dengan biaya tempat tinggal lebih murah dibandingkan dengan di pusat kota. Boleh jadi mereka sebelumnya tinggal di daerah inti kota tetapi terdorong keluar karena faktor biaya hidup dan ditambah jika mereka baru menikah sehingga perlu rumah baru. Begitu pula para pekerja migran dari desa kemungkinan memutuskan untuk tinggal di daerah pinggiran meskipun mereka juga bekerja di kota. Fenomena para pekerja di kota cenderung terdidik adalah karena industri yang tetap eksis di kota yang memerlukan tenaga yang terampil dan ahli (*skilled workers*) (Edward L. & Gottlieb D. (2009).

2.4 Mengurangi Pengangguran Terbuka di Perkotaan

2.4.1 Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian di Pedesaan

Urbanisasi adalah konsekuensi tak terhindarkan dari pembangunan sosial-ekonomi, tetapi urbanisasi tersebut banyak berakibat kepada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 1993 di Afrika urbanisasi mengakibatkan kelaparan karena banyaknya penduduk yang menganggur sehingga tidak mendapatkan pendapatan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan. Dengan adanya kondisi tersebut sekitar 40 % populasi di Afrika menggerakkan pertanian di perkotaan sehingga dapat mengurangi kelaparan (Armar-Klemesu, 2001). Maka sejak saat itu pemerintah setempat mencoba untuk mendekatkan akses pangan serta mencukupi kebutuhan pangan kaum miskin kota dengan membangun pertanian di kota-kota yang terdampak arus urbanisasi (Marta et al., 2020).

Havana adalah salah satu kota di Kuba yang pernah mengalami kesulitan pangan, namun sejak tahun 2003 sebesar 38% Kota Havana dipergunakan untuk pertanian. Pertanian di Havana adalah salah satu model swasembada pangan yang layak ditiru oleh negara lain. Program pertanian yang dilakukan oleh Cuba dan Havana pada pertanian sukses luar biasa karena program tersebut tidak hanya menyelesaikan permasalahan ekonomi baik dari segi memproduksi makanan, sayuran, buah-buahan segar dan menciptakan lapangan pekerjaan namun juga

meningkatkan pelestarian alam dan lingkungan (Koont, 2009). Selain di Havana dan Cuba, pertanian yang menuai kesuksesan juga terjadi di Montreal, Kanada. Pada tahun 1977, otoritas kota Montreal memutuskan bahwa 10% dari wilayah itu untuk selanjutnya akan dikategorikan sebagai ruang hijau. Sebagian besar lingkungan memiliki cukup tanah yang tersedia untuk memenuhi standar ini. Pada saat yang sama, pemerintah kota membuat program komunitas kebun kota yang menawarkan kesempatan bagi penduduk kota untuk menanam sayur-mayur. Program komunitas kebun kota memungkinkan masyarakat untuk memproduksi sendiri makanan berkualitas di lahan yang dikelola oleh pemerintah kota. Kegiatan ini mempromosikan pengetahuan praktis dan teknis baru tentang pertanian di Kota. Program komunitas Montreal ini dianggap sebagai program berkebun kelompok yang paling mudah diakses dan paling terorganisir di Amerika (World Urban Forum, 2006)

Program komunitas petani yang dibuat oleh pemerintah New York setelah Perang Dunia dapat mempekerjakan pengangguran untuk membuat 5000 kebun dalam 700 hektar tanah (Van leeuwen, 2010). Kemudian di Barcelona juga mengalami peningkatan pengangguran setelah terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan urbanisasi. Dampak urbanisasi ternyata berpengaruh terhadap kesediaan pangan, sehingga penduduk yang sudah tidak bekerja lagi melakukan penanaman sayur mayur agar dapat memenuhi kebutuhan pangan di Barcelona (Domene et al., 2005).

2.4.2 Mengembangkan Sektor Kunci Penyerap Tenaga Kerja di Perkotaan

Penciptaan lapangan kerja umumnya membutuhkan peningkatan investasi, konsumsi, belanja pemerintah baik belanja modal maupun belanja konsumsi serta ekspor. Dari berbagai faktor tersebut ada yang merupakan variabel kebijakan, yaitu dapat dipengaruhi secara langsung melalui kebijakan pemerintah seperti belanja modal dan konsumsi dari pemerintah. Adapula yang dapat dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung seperti investasi melalui berbagai kebijakan seperti *ease of doing business* (mempermudah ijin dan berbagai kemudahan lainnya di bidang usaha).

Namun, kebijakan belanja pemerintah yang bisa mempengaruhi secara langsung adalah sangat terbatas. Karena anggaran belanja pemerintah yang relatif

terbatas, maka anggaran belanja harus dipergunakan untuk yang memberikan dampak paling besar bagi penciptaan kesempatan kerja.

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling besar dampaknya, alat yang sangat populer dan komprehensif adalah input-output (Valadkhani, 2003; Ali et al., 2019; Gallegati et al., 2019; Anas et al., 2015; Wang & vom Hofe, 2007).

Dengan segala keterbatasannya, analisis input-output ini sangat berguna untuk mengukur potensi dampak suatu kebijakan atau kejadian. Oleh karena itu, dengan keterbatasan dana pemerintah, dan untuk penajaman prioritas sektor-sektor yang dapat dikembangkan guna mengidentifikasi sektor yang besar dampaknya di dalam menciptakan kesempatan kerja, maka analisis input-output yang telah digunakan berbagai peneliti merupakan salah satu pilihan (lihat untuk kasus Australia dalam Valadkhani (2003))

2.5 Kesimpulan

Dari berbagai penelitian di Indonesia dan berbagai negara berkembang serta negara maju, tingkat pengangguran memiliki fenomena yang hampir sama yaitu meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan karena migrasi desa kota dan berkembangnya daerah perkotaan melampaui batas administrasi akibat aglomerasi. Selain itu, semakin meningkatnya generasi muda yang berpendidikan yang lebih mudah mencari pekerjaan di daerah perkotaan sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya walaupun harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Perbedaan tingkat upah desa dan kota menjadi salah penyebab tingginya migrasi desa kota

Penciptaan kesempatan kerja di perkotaan yang semakin penting guna menyerap pengangguran di daerah perkotaan, sementara di lain pihak dana anggaran belanja pemerintah semakin terbatas, maka penajaman prioritas sangat diperlukan dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang berdampak besar bagi penciptaan kesempatan kerja.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.

Cakupan penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin dengan mengidentifikasi penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin, dan mengidentifikasi lapangan usaha apa yang memberi kesempatan kerja yang besar dan strategi apa yang diperlukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin.

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pejabat dinas terkait. Sementara data sekunder, yaitu data yang sudah diolah oleh suatu instansi atau data yang diperoleh dari pihak ketiga dalam hal ini adalah data yang sudah dipublikasikan oleh BPS Kota Banjarmasin maupun BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Puslitfo BNP2TKI, dan instansi terkait lainnya. Data sekunder ini meliputi data Profil Tenaga Kerja, Pekerja Migran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Domestik Regional Bruto, Statistik Industri Manufaktur Menengah dan Besar, dan dan berbagai data lainnya yang diperlukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dinamis dan data yang telah dipublikasikan oleh lembaga pemerintah atau instansi yang relevan. Selain itu juga dilakukan wawancara yang mendalam kepada pihak instansi terkait, dalam hal ini dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Puslitfo BNP2TKI.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis Data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Deskriptif

Untuk menggambarkan bagaimana keadaan tenaga kerja dan kondisi perekonomian Kota Banjarmasin dilakukan dengan analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar mudah dipahami pembaca, kemudian dianalisis secara deskriptif.

3.4.2 Analisis Elastisitas

Menurut (Simanjuntak, 1985), konsep elastisitas dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu, baik untuk masing-masing sektor maupun untuk ekonomi secara keseluruhan atau sebaliknya dapat digunakan untuk menyusun simulasi kebijakan pembangunan untuk ketenagakerjaan, yaitu dengan memilih beberapa alternatif laju pertumbuhan tiap sektor, maka dihitung kesempatan kerja yang dapat diciptakan. Kemudian dipilih kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi pasar kerja.

Elastisitas kesempatan kerja merupakan persentase perubahan kesempatan kerja dengan perubahan PDRB sebanyak 1 persen. Elastisitas kesempatan kerja untuk masing-masing sektor dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\varepsilon = \frac{\% \Delta N_i}{\% \Delta Y_i} = \frac{\Delta N_i / N_i}{\Delta Y_i / Y_i}$$

Di mana: N_i adalah jumlah kesempatan kerja (orang yang bekerja) di sektor- i ; Y_i adalah PDRB sektor ke- i , Δ menunjukkan besarnya perubahan.

Artinya jika tingkat pertumbuhan ekonomi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan akan naik dan sebaliknya jika tingkat pertumbuhan menurun maka jumlah orang yang dipekerjakan akan turun. Jadi kesempatan kerja dan PDRB hubungannya positif.

3.4.3 Analisis Input-Output

Analisis input-output memberikan gambaran mengenai perekonomian wilayah serta menggambarkan arus barang/jasa dari dan ke industri serta keterkaitannya dengan industri lainnya. Analisis input-output dapat digunakan untuk melihat dampak suatu kebijakan terhadap perekonomian. Tabel Input Output (I-O) merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu (BPS Kalimantan

Selatan, 2011). Oleh karena itu Tabel I-O merupakan sebuah model kuantitatif yang menunjukkan potret keadaan ekonomi (*Economics Landscape*) suatu wilayah pada suatu periode tertentu (tahun).

Dari analisis input-output dapat dihitung angka pengganda output, angka pengganda pendapatan rumah tangga, dan angka pengganda kesempatan kerja.

Untuk menghitung angka multiplier atau pengganda output diperoleh dengan rumus:

$$M_o = (I - A)^{-1}$$

Di mana:

M_o = matriks multiplier/pengganda output berukuran $n \times n$;

I = matriks identitas berukuran $n \times n$

A = matriks koefisien teknis berukuran $n \times n$

$B = [I - A]^{-1}$ = matriks kebalikan Leontief

Sebenarnya yang menjadi pusat analisis dari tabel input-output adalah matriks kebalikan Leontief $[I - A]^{-1}$ atau matriks multiplier/pengganda output.

Untuk mendapatkan angka pengganda pendapatan pekerja:

$$M_I = \widehat{V}_{201} [I - A]^{-1}$$

Pendapatan pekerja: $V_{201} = M_I \cdot F = \widehat{V}_{201} [I - A]^{-1} \cdot F$

Di mana:

\widehat{V}_{201} = matriks diagonal koefisien nilai upah dan gaji

V_{201} = vektor pendapatan pekerja, dimensi $n \times 1$

M_I = matriks pengganda mendapatkan pendapatan pekerja

$[I - A]^{-1}$ = matriks kebalikan Leontief

Angka Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*) Pekerja sektoral:

$$I_m = \widehat{V}_{201} [I - A]^{-1} \cdot \widehat{V}_{201}^{-1}$$

Untuk menghitung angka pengganda atau dampak kesempatan kerja sebagai berikut:

$$\text{Koefisien Tenaga Kerja, } l_j = \frac{TK_j}{X_j}$$

Di mana:

l_j = koefisien tenaga kerja

TK_j = Jumlah tenaga kerja di sektor-j

X_j = Nilai output atau nilai produksi sektor j

Untuk mendapatkan kembali angka TK_j , jika X_j sdh diketahui $TK_j = l_j \times X_j$, sehingga sekarang kita memiliki kumpulan l_j sebanyak n (banyak sektor dalam Tabel IO), yang kemudian ditempatkan ke dalam matrik diagonal.

3.5 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam waktu satu bulan. Alokasi dari masing-masing jenis kegiatan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Alokasi Waktu Kegiatan

KEGIATAN	PERIODE BULAN			
	PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT
Kajian pustaka dan dokumentasi data	X	X		
Analisis data dan penulisan laporan			X	X

BAB 4

PEMBAHASAN

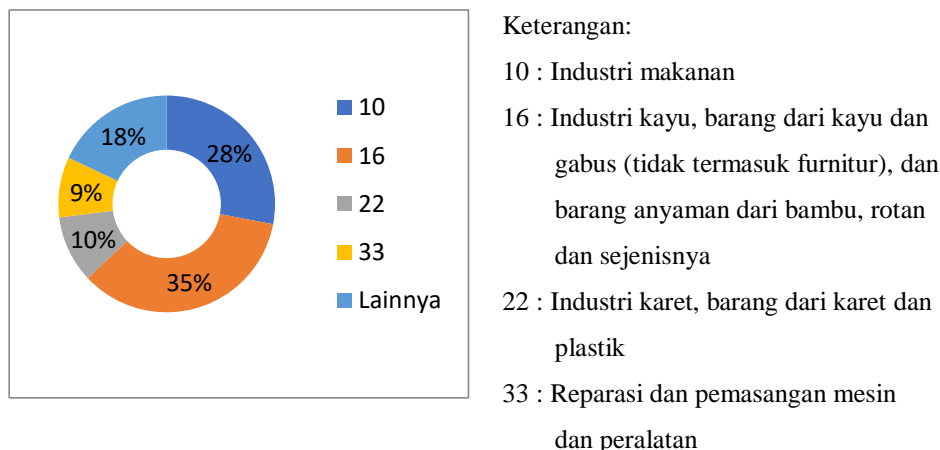
4.1 Gambaran Umum Kota Banjarmasin

4.1.1 Pendahuluan

Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian Kalimantan Selatan. Letaknya di semenanjung Pulau Kalimantan yang relatif dekat dengan pusat pertumbuhan Indonesia di Pulau Jawa. Hal ini menjadikannya sangat cocok menjadi pintu gerbang tidak hanya bagi Provinsi Kalimantan Selatan tapi juga bagi provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Keadaan ini mengakibatkan sektor perdagangan cukup berkembang. Volume arus bongkar muat barang terutama di pelabuhan relatif besar untuk ukuran kota di Wilayah Tengah Indonesia. Pada 2019, berat Bongkar Barang sebesar 863.951 ton sementara berat Muat Barang sebesar 652.353 ton.

Perkembangan ekonomi Banjarmasin ditunjang oleh daerah-daerah *hinterland* yang memiliki berbagai sumberdaya alam. Hal inilah yang mendukung berkembangnya industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar. Dari segi jumlah unit usaha, sektor ini didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga namun dari segi nilai produksi dan investasi didominasi industri menengah dan besar.

Berdasarkan jumlah unit usahanya, perusahaan menengah dan besar di kota Banjarmasin tahun 2019 didominasi Industri Pengolahan Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya dengan porsi 35 persen. Industri Pengolahan Makanan menyusul dengan porsi sebesar 28 persen. Jenis industri yang jumlahnya terbesar selanjutnya adalah Industri Karet, dan Barang dari Karet Plastik sebesar 10 persen dan Industri Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan dengan porsi 9 persen.



Grafik 6 Persentase Industri Manufaktur Menengah dan Besar Kota Banjarmasin, Tahun 2019

Sumber: BPS, Statistik Industri Manufaktur Menengah dan Besar, 2019.

4.1.2 Kondisi Ekonomi Kota Banjarmasin

Total PDRB kota Banjarmasin pada 2019 senilai Rp. 33,04 Triliun. Telah terjadi kenaikan secara konsisten jika dibanding dengan tahun sebelumnya khususnya dari 2017 dan 2018, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

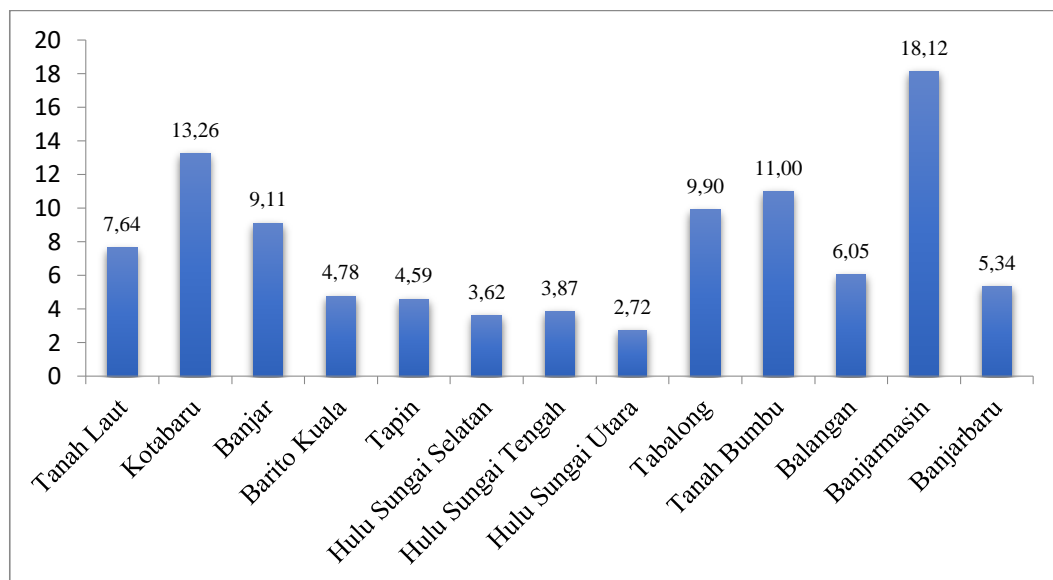
Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Banjarmasin 2017 - 2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
1. Pertanian	667.206,80	719.916,50	771.340,29
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3. Industri Pengolahan	5.132.991,31	5.532.265,74	5.900.211,80
4. Listrik, Gas, dan Air	2.999.532,51	3.332.718,87	3.715.122,08
5. Konstruksi	3.518.297,34	3.858.040,96	4.244.080,10
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	4.531.672,84	4.972.675,81	5.468.603,32
7. Transportasi dan Komunikasi	4.512.043,08	4.871.301,85	5.040.441,93
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.149.022,84	3.439.892,44	3.837.990,08
9. Jasa-jasa lainnya	3.328.030,75	3.668.873,44	4.064.540,87
PDRB	27.838.797,47	30.395.685,61	33.042.330,47

Sumber: BPS Kota Banjarmasin (2020), Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019.

Sektor yang memiliki nilai terbesar dalam PDRB adalah industri pengolahan. Dominasi sektor ini terlihat konsisten sepanjang periode 2017 – 2019. Sektor-sektor yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan nilai tambah produksi pada perekonomian Kota Banjarmasin adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Transportasi dan Komunikasi. Inilah yang juga

menyebabkan ekonomi Kota Banjarmasin paling besar dan penting di Wilayah Kalimantan Selatan.



Grafik 7 PDRB Kabupaten/Kota (dalam %) Pada Perekonomian Kalimantan Selatan 2019
 Sumber: BPS Kota Banjarmasin (2020), Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019.

Grafik 7 menunjukkan bahwa *size* atau besaran ekonomi Kota Banjarmasin adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. PDRB Kota Banjarmasin memiliki kontribusi lebih dari 18% dari total *size* ekonomi Kalimantan Selatan. Ini membuktikan sebagai ibukota provinsi, Banjarmasin secara relatif telah berfungsi sebagai pusat perekonomian sekaligus pertumbuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar lainnya adalah Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tabalong. Kabupaten-kabupaten ini pada umumnya adalah wilayah penghasil batubara yang cukup besar. Dengan struktur seperti ini maka daerah-daerah tersebut patut menaruh perhatian serius dalam upaya menjaga keberlangsungan perekonomiannya. Khususnya dengan mengembangkan unit-unit produksi lain di luar sektor pertambangan. Pada sisi lain, belum berkembangnya sektor non primer pada sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan ini dapat menjadi peluang. Banjarmasin dapat membentuk sinergi dan menjadi pusat pengolahan, distribusi dan perdagangan bagi bahan-bahan baku yang tersebar di wilayah sekitarnya.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarmasin 2011 - 2019 (Persen)

Lapangan Usaha	2011	2013	2015	2017	2019	Rerata
1. Pertanian	(0,89)	5,49	3,35	5,75	5,21	3,53
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	1,76	3,36	2,94	6,19	5,80	3,95
4. Listrik, Gas, dan Air	2,67	2,52	9,64	6,87	7,10	6,50
5. Konstruksi	6,38	3,82	6,23	6,94	8,41	6,44
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	6,43	7,95	6,42	6,97	7,10	7,07
7. Transportasi dan Komunikasi	6,96	7,57	7,25	6,58	6,80	7,16
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,45	12,36	5,23	6,27	2,65	6,80
9. Jasa-jasa lainnya	5,99	6,44	7,44	5,78	7,51	6,54
PDRB	5,15	6,93	5,79	6,40	6,13	6,15

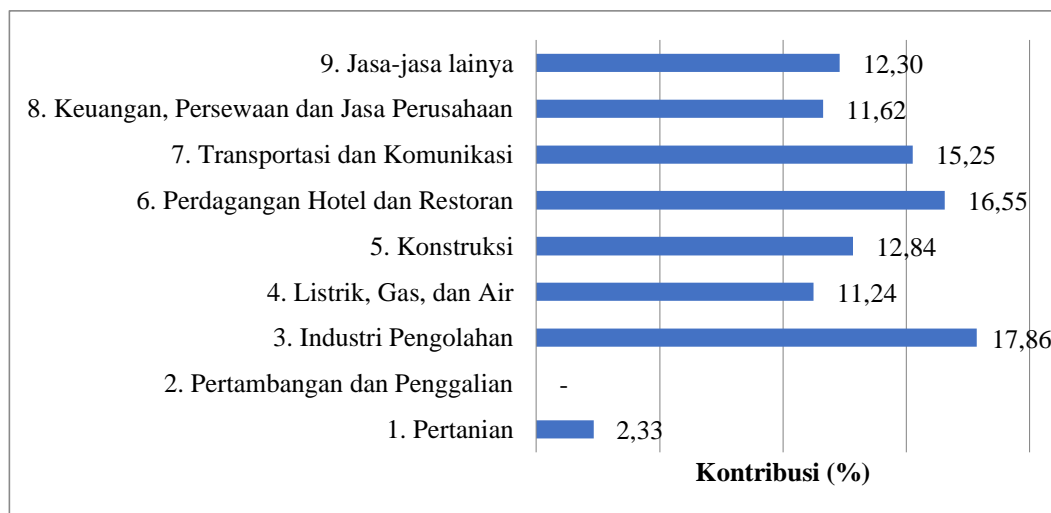
Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha, Berbagai Tahun.

Laju pertumbuhan PDRB adalah hal yang penting diperhitungkan untuk dapat melihat kemajuan ekonomi. Sepanjang 2011–2019 rata-rata pertumbuhan total PDRB Banjarmasin adalah 6,15%. Tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun berfluktuasi di mana pada dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sehingga tingkat pertumbuhan pada 2019 hanya 6,13%.

Sektor Transportasi dan Komunikasi mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi pada periode 2011–2019, yaitu 7,16%. Tidak jauh di bawahnya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang menyusul dengan tumbuh rerata sebesar 7,07%. Sementara itu, sektor-sektor lain yang mampu tumbuh pada tingkat tertinggi adalah sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-jasa Lainnya, Sektor Listrik, Gas, dan Air, dan sektor Konstruksi dengan pertumbuhan rata-rata pertahun antara 6,44% - 6,80%. Sektor Transportasi dan Komunikasi, kendati tumbuh dengan tingkat rata-rata tertinggi, sejak 2017 hingga 2019 tingkat pertumbuhannya tidak pernah terlampaui tinggi lagi karena hanya berkisar antara 6,58% dan 6,80%.

Sektor-sektor yang tumbuh tertinggi per 2019 adalah sektor Konstruksi dengan besaran 8,41% dan sektor Jasa-jasa Lainnya dengan besaran 7,51%. Sektor Konstruksi yang tumbuh signifikan ini sejalan dengan adanya peningkatan investasi pada proyek-proyek di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah

termasuk dalam program prioritas nasional dan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Sektor Jasa-jasa Lainnya juga mampu tumbuh signifikan karena sejalan dengan karakteristik wilayah kota dengan sektor kuncinya di bidang jasa, perdagangan dan *utility* (energi dan air).



Grafik 8 Share (%) Sektoral dalam PDRB (ADHB) Kota Banjarmasin 2019

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019.

Struktur ekonomi Kota Banjarmasin didominasi oleh sektor Industri Pengolahan. Jenis industri yang cukup berkembang di sini adalah Industri Pengolahan Kayu, Barang dari kayu, dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya serta Industri Pengolahan Makanan, Industri Karet, dan Barang dari Karet Plastik, dan Industri Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Selain itu, terdapat berbagai industri kecil yang terus berkembang. Pembinaan pada industri kecil ini dilakukan melalui model sentra industri sehingga terdapat beberapa sentra seperti Sentra Industri Sasirangan, Sentra Industri Mebel Kayu, Sentra Industri Kerupuk dan Sentra Industri Kue Kering.

Struktur ekonomi Kota Banjarmasin juga dibentuk oleh empat sektor penting lainnya yaitu Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Sektor Transportasi dan Komunikasi, Sektor Konstruksi, dan Sektor Jasa-jasa Lainnya. Di luar sektor-sektor tersebut kontribusinya relatif kecil dalam PDRB.

Tabel 4 PDRB dan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarmasin 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
<i>Atas Dasar Harga Berlaku</i>	23.028,08	25.294,18	27.838,80	30.395,69	33.042,33
<i>Atas Dasar Harga Konstan 2010</i>	17.511,61	18.611,32	19.801,58	21.065,48	22.356,63
Nilai PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
<i>Atas Dasar Harga Berlaku</i>	34.093,45	36.969,91	40.183,43	43.368,57	46.630,05
<i>Atas Dasar Harga Konstan 2010</i>	25.926,23	27.202,25	28.582,25	30.056,23	31.550,16
<i>Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (%)</i>	4,34	4,92	5,07	5,16	4,97
<i>Jumlah Penduduk (orang)</i>	675.440	684.183	692.793	700.869	708.606
<i>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)</i>	1,38	1,29	1,26	1,17	1,10

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2019.

Indikasi paling awal dari kemanfaatan pertumbuhan ekonomi bagi penduduk ialah diukur dari perkembangan PDRB per kapita. Dari Tabel 4 terlihat bahwa pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada 2019, pertumbuhannya sebesar 4,97% yang menurun jika dibandingkan dengan 2018 yang sudah mencapai 5,16%. Ini berarti kemampuan perekonomian daerah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu terjaga. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan beban pertumbuhan penduduk di 2019 lebih berat dibanding 2018. Agar pertumbuhan ekonomi cukup berkualitas maka pertumbuhan PDRB per kapita harus dapat terus ditingkatkan. Peningkatan ini akan memberikan peluang kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat dengan adanya penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

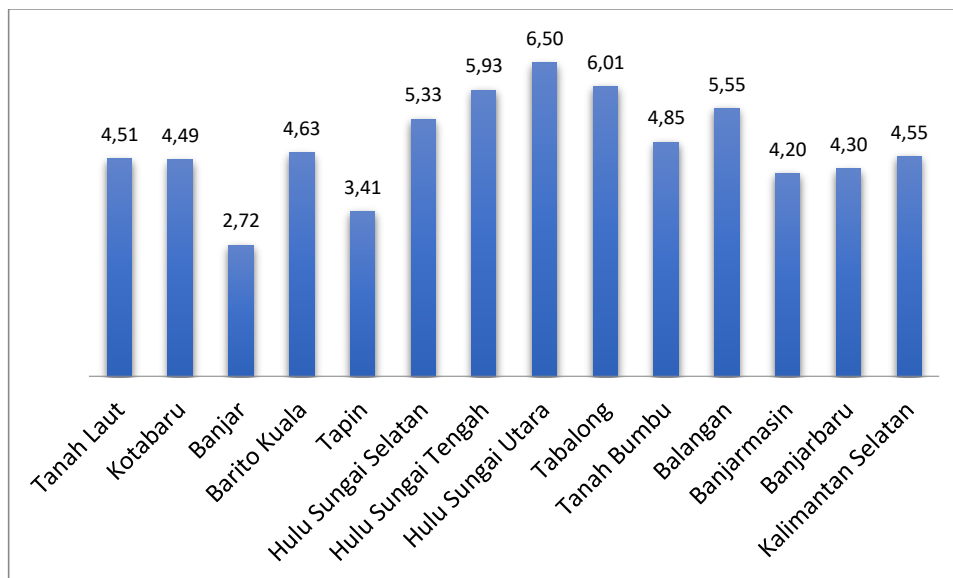
Tabel 5 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Banjarmasin 2019 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Bahan Makanan	1,64	-0,94	0,07	1,38	2,11	1,04	-0,39	4,25	-0,46	-0,19	1,25	1,1
Makanan Jadi, Rokok, dan Tembakau	0,05	0,38	0,37	0,14	1,46	0,53	0,05	3,89	0,46	0,4	0,01	0,23
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	-0,03	0,08	-0,04	0,17	0,07	0,22	0,02	0,59	0,1	0,11	-0,08	-0,29
Sandang	0,57	-0,33	0,64	0,23	1,04	1,35	1,27	6,30	2,17	-0,06	0,22	-0,03
Kesehatan	0,46	0,41	0,5	0,95	0,4	0,23	0,09	4,48	0,9	0	0	0,07
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0,09	0,06	-0,06	0,1	0,14	0,15	0,86	1,69	0,05	0,18	0,41	-0,14
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,62	0,01	0,58	3,46	-0,03	-1,31	-1,01	3,05	-1,21	0,15	-0,65	2,3

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/>

Hal yang juga penting dilihat untuk mengukur kinerja ekonomi adalah tingkat inflasi. Perkembangan tingkat inflasi sepanjang tahun 2019 di Kota Banjarmasin berjalan sangat dinamis. Hal yang cukup menarik adalah inflasi bulanan tertinggi sepanjang 2019 paling sering terjadi pada Kelompok Pengeluaran Sandang. Inflasi tertinggi sepanjang tahun pada Kelompok Pengeluaran Sandang ini terjadi pada Bulan Agustus, yakni 6,30%. Dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain, urgensi kebutuhan sandang bukan tergolong paling urgen. Oleh karena itu, kenaikan inflasi di kelompok ini relatif masih aman bagi stabilitas belanja masyarakat.

Sepanjang 2019, inflasi berkisar -1,31% s/d 6,30%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga telah berhasil dilakukan dengan efektif karena inflasi hanya berada pada kisaran pertengahan satu digit. Inflasi pada kelompok bahan makanan yang biasanya rentan dan dapat berdampak lebih luas, mampu ditekan. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini paling tinggi hanya 4,25% pada Bulan Agustus. Kelompok Pengeluaran Transportasi yang berpengaruh luas dalam mendorong terjadinya inflasi secara keseluruhan juga sangat terkendali sehingga sempat mengalami deflasi pada beberapa bulan.



Grafik 9 Persentase Penduduk Miskin Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2019

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/>

Indikator kinerja perekonomian yang cukup penting selanjutnya adalah tingkat kemiskinan. Secara umum tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan cukup rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada Maret 2019, dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,55% Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Bali. Rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 9,41%.

Tingkat kemiskinan Kota Banjarmasin pada 2019 adalah sebesar 4,2%. Angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan rata-rata Kalimantan Selatan yang sebesar 4,55%. Hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan Kota Banjarmasin berada di posisi terendah ketiga dalam Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin.

4.1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin

Kondisi ketenagakerjaan Kota Banjarmasin dipengaruhi berbagai faktor. Sebagai kota besar di Provinsi Kalimantan Selatan, pasokan pencari kerja tidak hanya bersumber dari penduduk setempat tetapi juga dari para pendatang atau migran yang berasal dari berbagai wilayah baik dalam provinsi maupun luar Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 6 Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin 2010 – 2019

Komponen Ketenaga Kerjaan	2010	2011	2013	2015	2017	2019
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	455.005	464.221	477.591	493.509	508.991	463.297
<i>Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja (Persen)</i>		2,03	2,88	3,33	3,14	-8,98
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	300.320	302.758	299.799	327.864	334.296	346.184
<i>Pertumbuhan Penduduk Angkatan Kerja (Persen)</i>		0,81	-0,98	9,36	1,96	3,56
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	154.685	161.463	177.792	165.645	174.695	117.113
Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	278.287	270.084	284.685	300.667	304.650	319.572
<i>Pertumbuhan Penduduk Bekerja (Persen)</i>		-2,95	5,41	5,61	1,32	4,90
Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)	22.033	32.674	15.114	27.197	29.646	26.612
<i>Pertumbuhan Penduduk Pengangguran (Persen)</i>		48,30	-53,74	79,95	9,00	-10,23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	66	65,22	62,77	66,44	65,68	74,72
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)</i>	7,34	10,79	5,04	8,3	8,87	7,69

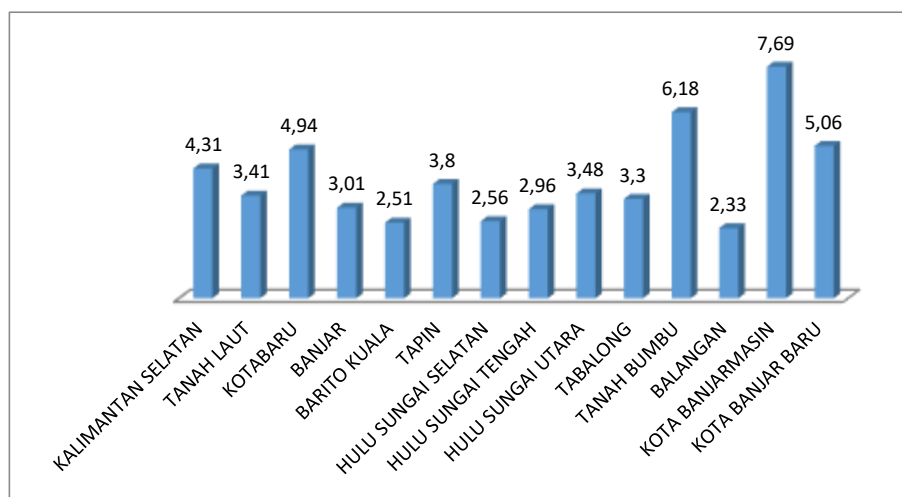
Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/>

Jumlah penduduk usia kerja Kota Banjarmasin yang menjadi sumber utama angkatan kerja yang naik secara konsisten dari 2010 sampai 2017. Pada 2019, angka ini berkurang dan hanya berjumlah 463.297 orang atau turun 8,98% dari tahun 2017. Penurunan ini tidak diikuti penurunan dalam jumlah angkatan kerja pada waktu bersamaan. Angkatan kerja ternyata meningkat sangat pesat terutama pada 2015 dan pada 2019. Ini menuntut adanya penyediaan lapangan kerja yang cukup besar untuk mengendalikan tingkat pengangguran. Lapangan kerja yang tumbuh memadai dibutuhkan agar para pencari kerja dapat menemukan pekerjaan barunya dan yang sudah bekerja tetap menempati pekerjaannya atau tidak kehilangan pekerjaan. Jika tidak demikian maka peningkatan angkatan kerja hanya akan menambah jumlah pengangguran.

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat secara absolut pada periode 2010 s/d 2019 kendati pada 2017 dan 2019 pertumbuhannya

melambat. Dengan asumsi jumlah angkatan kerja dapat terjaga maka seharusnya tingkat pengangguran akan dapat terus diturunkan. Akan tetapi, jika bertambahnya kesempatan kerja diikuti dengan terjadinya penambahan jumlah angkatan kerja baru secara bersamaan maka tingkat pengangguran tidak bisa dikendalikan. Naik atau turunnya tingkat pengangguran akan sangat tergantung pada perbandingan antara besaran yang mencari pekerjaan ditambah yang berhenti bekerja dengan yang memperoleh pekerjaan baru.

Tabel 6 menunjukkan jumlah penduduk pengangguran secara umum cenderung terus meningkat. Pada 2019 terjadi penurunan sebesar -10,23%. Kendati demikian jumlahnya secara konsisten meningkat pada 2015 – 2017 dengan pertumbuhan per dua tahun masing-masing 79,95% dan 9,00%. Hal inilah yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin masih tinggi yaitu sebesar 7,69% per 2019. Angka ini sebenarnya sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan 2018 yang mana Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin adalah 8,87%. Dibandingkan dengan semua kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan, tingkat pengangguran kota Banjarmasin adalah yang tertinggi, jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya 4,31% saja.



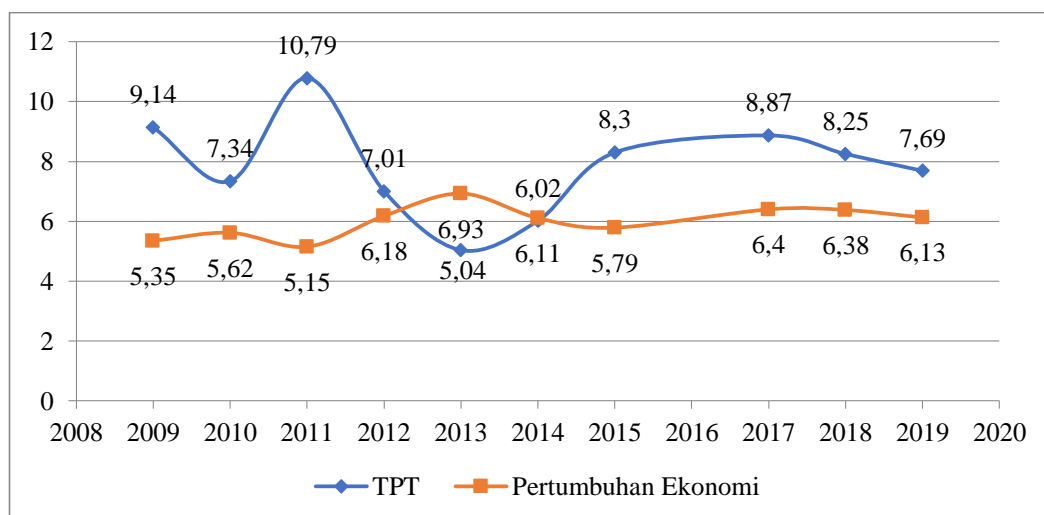
Grafik 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2019 (dalam Persen)

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarmasin pada 2019 sebesar 7,69% adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di

Kalimantan Selatan. Daerah-daerah lainnya memiliki tingkat pengangguran yang relatif jauh lebih rendah dari Banjarmasin. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah dengan TPT tertinggi kedua hanya memiliki angka 6,18%.

Tingginya pengangguran sungguh ironis jika dibandingkan dengan kondisi perkembangan perekonomian di Kota Banjarmasin yang relatif paling tinggi. Perlu dilihat lebih dalam apa yang menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran ini. Pada saat bersamaan, berkembangnya perekonomian yang cukup baik semestinya dapat mendorong menurunnya tingkat pengangguran, tapi itu tidak terjadi. Patut diduga, terdapat hal-hal lain di luar struktur produksi yang turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran ini, seperti misalnya migrasi. Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka terlihat bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin.



Grafik 11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin, 2009-2019

Sumber: BPS, berbagai tahun.

Dari Grafik 11, nampak bahwa pada pergerakan dari tahun 2010 ke 2011, pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,62% menjadi 5,15%. Di saat yang bersamaan, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari 7,34% tahun 2010 menjadi 10,79% tahun 2011. Begitu pula pada pergerakan dari tahun 2014 ke tahun 2015, pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,11% menjadi 5,79%. Di sisi lain, terjadi peningkatan TPT dari 6,02% menjadi 8,3%. Tren yang berbeda terjadi sepanjang tahun 2017 – 2019. Pada rentang waktu ini pelambatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan TPT secara bersamaan.

4.1.4 Kesimpulan

Perekonomian Kota Banjarmasin adalah yang paling dominan di dalam kawasan Kalimantan Selatan. Hal ini dimungkinkan karena secara geografis Kota Banjarmasin menjadi pintu gerbang bagi daerah-daerah sekitar menuju pusat pertumbuhan Indonesia di Pulau Jawa. Beberapa sektor ekonomi, seperti Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Transportasi dan Komunikasi menjadi sektor paling dominan.

Jika dilihat dari perkembangan ketenagakerjaan yang ada, telah terjadi kontradiksi. Di tengah perkembangan ekonomi yang relatif paling maju di wilayah Kalimantan Selatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banjarmasin justru paling tinggi. Jumlah penduduk bekerja yang dapat menggambarkan tingkat kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja tumbuh cukup baik. Akan tetapi, hal ini ternyata diikuti oleh bertambahnya jumlah pengangguran yang masih besar. Itulah mengapa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarmasin masih tinggi.

4.2 Kesempatan Kerja Di Kota Banjarmasin

4.2.1 Pendahuluan

Kesempatan kerja yang terdapat di Kota Banjarmasin tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor-faktor ekonomi secara langsung sangat erat kaitannya dengan perkembangan kesempatan kerja yang terjadi. Sementara, faktor-faktor non ekonomi, seperti regulasi, birokrasi, kondisi sosial-politik dan sebagainya tidak kalah penting dalam mendukung terbukanya peluang usaha dan peluang kerja di berbagai sektor produktif. Faktor ekonomi, dalam hal ini tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin dapat dikatakan berperan sangat penting karena merepresentasikan unsur-unsur lainnya yang berpengaruh bagi kesempatan kerja. Setiap terjadi permintaan tenaga kerja pada sektor produktif maka akan menentukan besaran tingkat produksi. Besaran tingkat produksi sangat dipengaruhi oleh keputusan pelaku usaha dalam merespon tingkat permintaan di pasar didukung oleh ketersediaan faktor produksi yang tersedia. Permintaan di pasar akan barang dan jasa tidak hanya berasal dari pasar lokal di kota Banjarmasin tapi juga dari pasar

lainnya didalam negeri maupun dari luar negeri. Nilai keseluruhan dari hasil produksi unit-unit usaha ini diukur sebagai tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi Kota Banjarmasin. Perkembangan PDRB dari periode ke periode berikutnya setiap tahun menunjukkan tingkat pertumbuhan.

4.2.2 Pengangguran dan Penyebabnya

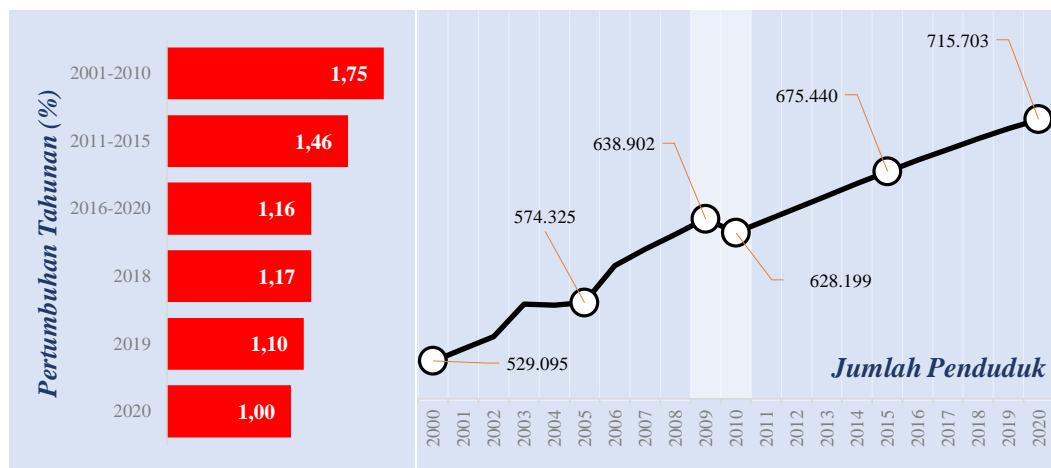
4.2.2.1 Migrasi

Kota Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang tertinggi dibandingkan dengan kota dan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sangat wajar, karena sebagai ibukota Provinsi, segala aktivitas ekonomi yang sangat beragam dengan jumlah penduduk yang tertinggi tentu menarik minat para pencari kerja di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, keragaman dan aktivitas ekonomi yang tinggi akan menarik (*pull factor*) minat penduduk untuk mencoba mencari pekerjaan di Kota Banjarmasin. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja di daerah pedesaan dan kabupaten-kabupaten sekitar Kota Banjarmasin memberikan dorongan (*push factor*) bagi pencari kerja untuk mencari peruntungan di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, Kota Banjarmasin menjadi salah satu kota tujuan utama untuk para pencari kerja. Daya tarik Kota Banjarmasin menjadi tujuan pencari kerja salah satunya adalah karena perbedaan tingkat upah seperti tesis Harris & Todaro (1970). Selain itu, daya dorong di desa karena terbatasnya lapangan kerja di desa sehingga banyak penduduk mencari pekerjaan di kota. Dengan fenomena ini, maka para pencari kerja di Kota Banjarmasin umumnya adalah para migran daerah pedesaan. Dengan segala keterbatasan data yang tersedia, Tim Peneliti berupaya mencoba mengidentifikasi kesesuaian antara teori dengan data empiris yang berdasarkan data sekunder di kota Banjarmasin.

Migrasi merupakan suatu fenomena mobilitas horizontal penduduk yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya. Untuk melihat apakah memang Kota Banjarmasin merupakan kota yang memiliki daya tarik untuk para pencari kerja dari luar Kota Banjarmasin, maka diperlukan data migrasi.

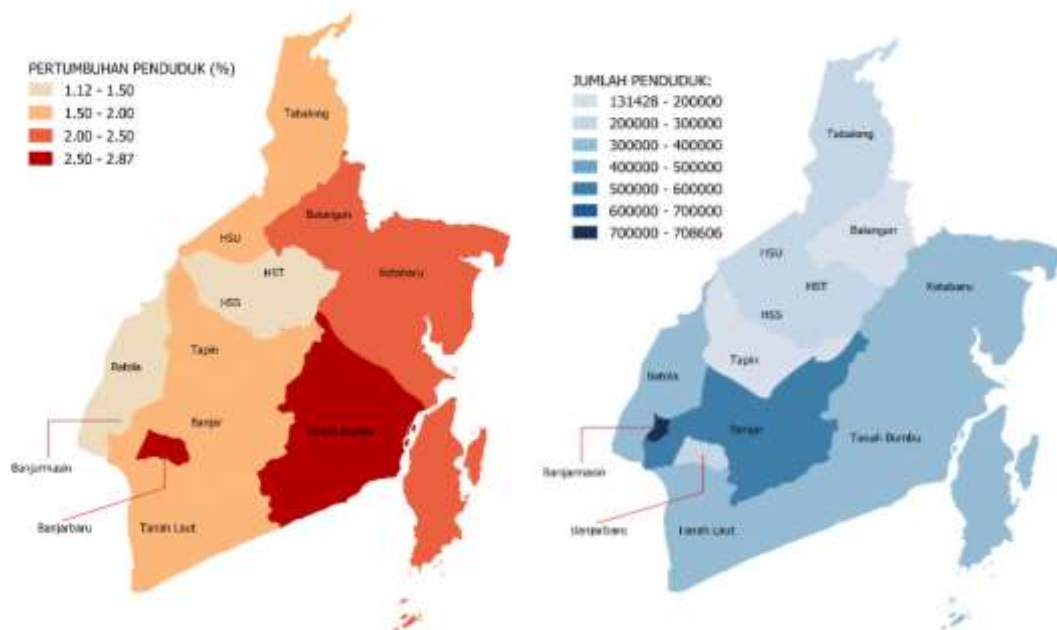
Jumlah penduduk Kota Banjarmasin mencapai 700 ribu jiwa lebih atau hampir 17 persen dari jumlah penduduk provinsi pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan Kota Banjarmasin termasuk rendah akhir-akhir ini dibandingkan

dengan kota dan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin memiliki kecenderungan menurun.



Grafik 12 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarmasin

Sumber: BPS, diolah



Peta 1 Pertumbuhan Penduduk 2016-2019 dan Jumlah Penduduk 2019 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPS, diolah.

Untuk mengetahui **pertumbuhan penduduk alamiah** Kota Banjarmasin dan jumlah **migrasi** yang terjadi, diperlukan data jumlah penduduk lahir (tingkat kelahiran kasar/ *Crude Birth Rate* (CBR)) dan jumlah kematian (tingkat kematian kasar/ *Crude Death Rate* (CDR)). Tim Peneliti mencoba untuk membuat analisis apakah para pencari kerja ini merupakan para migran dari luar Kota Banjarmasin

dengan menghitung tingkat migrasi masuk di Kota Banjarmasin. Dengan segala keterbatasan data yang ada, untuk menghitung tingkat migrasi masuk, maka Tim Peneliti membuat beberapa asumsi untuk data yang tidak tersedia.

Formula untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_0 + (L - M) + (I - E)$$

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk pada awal tahun

L = Jumlah kelahiran pada tahun t

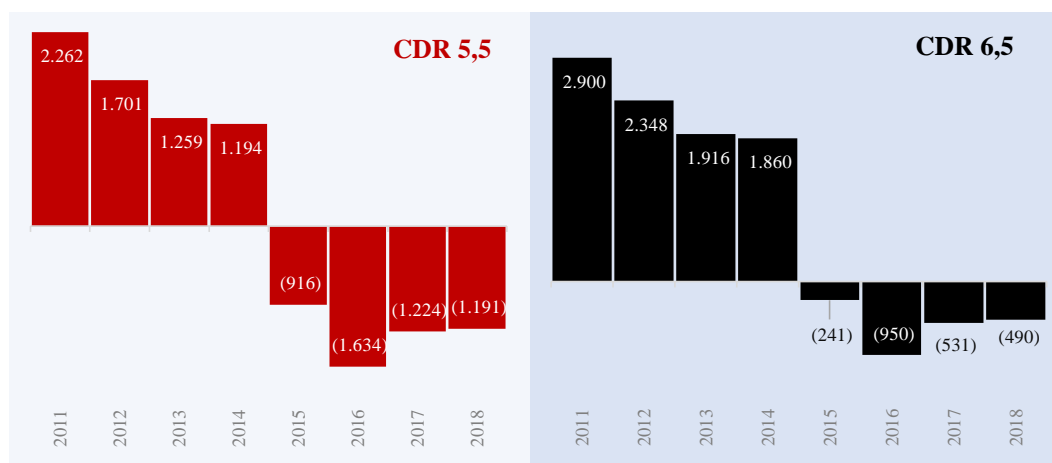
M = Jumlah kematian pada tahun t

I = Jumlah imigrasi (penduduk yang masuk) pada tahun t

E = Jumlah emigrasi (penduduk yang keluar) pada tahun t

Dari hasil perhitungan dengan sejumlah asumsi yang digunakan, terjadi **migrasi neto negatif** di Kota Banjarmasin sejak tahun 2015. Ternyata kota besar menarik terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota, namun sejak tahun 2015 terjadi sebaliknya yaitu migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk. Ada beberapa kemungkinan terjadinya fenomena ini di Kota Banjarmasin.

Hasil estimasi migrasi neto Kota Banjarmasin tahun 2011-2018 dengan dua skenario, yaitu CDR 6,5 dan 5,5 persen menunjukkan bahwa walaupun dengan asumsi CDR atau tingkat kematian kasar yang lebih rendah, migrasi netto masih tetap negatif. Hal ini berarti bahwa migrasi keluar ternyata memang masih lebih besar daripada migrasi masuk.



Grafik 13 Estimasi Migrasi Netto Kota Banjarmasin 2011-2018 dengan CDR 5,5 dan 6,5

Sumber: BPS, diolah.

Kotak 1: Asumsi Estimasi CDR

Pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin termasuk yang paling rendah dibandingkan daerah lainnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode 2016-2020 Kota Banjarmasin hanya sebesar 1,16 persen sedangkan rata-rata untuk seluruh daerah adalah 1,55 persen.

PENJELASAN ASUMSI:

- *Crude Birth Rate atau CBR dapat dihitung dengan menggunakan data jumlah kelahiran dan jumlah penduduk.*
- *Sedangkan data jumlah kematian tidak tersedia untuk menghitung Crude Death Rate atau CDR. Karena itu digunakan asumsi.*
- *Pertama, asumsi berpijak pada proyeksi BPS, CDR Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010, 2015, dan 2020 masing-masing adalah 6,6, 6,4, dan 6,5 persen.*
- *Kedua, Untuk menghitung migrasi neto, dibuat dua skenario CDR Kota*

Sejak tahun 2015 jumlah **emigrasi** lebih banyak dibandingkan dengan jumlah **imigrasi**. Artinya, secara neto penduduk Kota Banjarmasin berpindah keluar daerah. Ada beberapa kemungkinan mengapa migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk sejak tahun 2015.

Pertama, penduduk pindah ke luar batas Kota Banjarmasin, dengan tetap bekerja di Kota Banjarmasin untuk mencari tempat tinggal yang lebih murah di daerah pinggiran kota atau di daerah penyangga Kota Banjarmasin. *Kedua*, penduduk meninggalkan Kota Banjarmasin dan kembali ke daerah asal karena kehilangan pekerjaan akibat PHK atau usaha mereka tutup atau bangkrut.

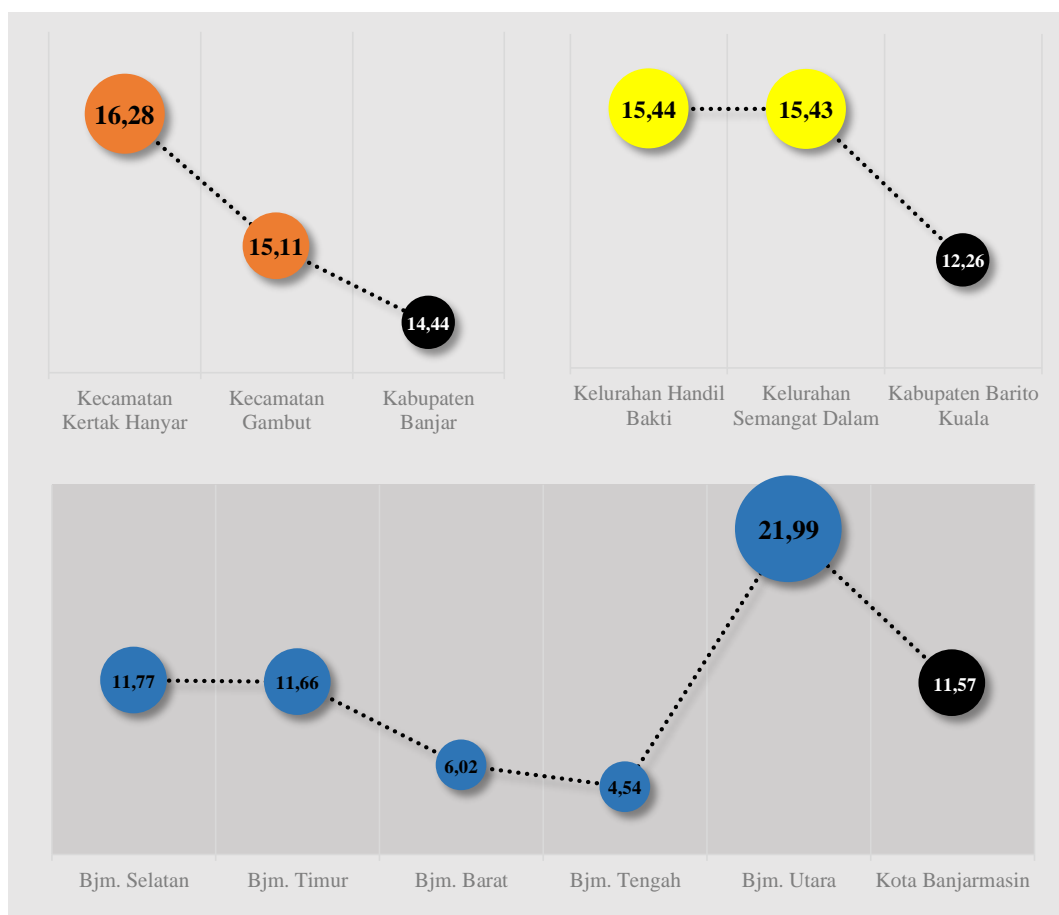
Kemungkinan rendahnya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin tersebut adalah berkaitan dengan tingginya harga dan terbatasnya tanah yang tersedia untuk pemukiman sehingga pemukiman penduduk berkembang di daerah penyangga seperti Kertak Hanyar dan Gambut di Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti dan Semangat Dalam di Kabupaten Barito Kuala.

Pertumbuhan penduduk di daerah penyangga Kota Banjarmasin seperti Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut di Kabupaten Banjar adalah lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar sebagai acuan. Ini artinya bahwa pertumbuhan di kedua Kecamatan tersebut kemungkinan besar adalah akibat akibat luberan migrasi masuk dari para pekerja dan penduduk yang bekerja di Kota Banjarmasin.

Demikian juga Kecamatan Handil Bakti dan Kecamatan Semangat di Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten Barito Kuala. Ini juga menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut menyerap luberan penduduk yang migrasi ke kecamatan tersebut sementara mereka tetap bekerja di Kota Banjarmasin.

Untuk mengetahui adanya indikasi penduduk yang berkerja di Kota Banjarmasin tetapi tinggal di daerah penyangga adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan penduduk di daerah penyangga tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan pada tingkat kabupaten di mana daerah penyangga tersebut berada.

Data yang disajikan pada tiga grafik berikut memperlihatkan pertumbuhan penduduk di daerah penyangga lebih besar dari pada pertumbuhan penduduk pada kabupaten induknya dan terlebih pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin.



Grafik 14 Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarmasin Dan Daerah Penyangga Tahun 2010 – 2018

Sumber: BPS, diolah.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin adalah karena terbatasnya lapangan kerja yang ada di Kota Banjarmasin dan tidak sebanding dengan pencari kerja yang ada di Kota Banjarmasin. Artinya ada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Pertama*, Kota Banjarmasin yang luas wilayahnya relatif sempit namun mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat mengakibatkan kegiatan ekonomi yang semakin beragam dan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan permintaan akan tempat tinggal sehingga berakibat meningkatnya harga tanah dan rumah di daerah perkotaan. Kondisi ini mengakibatkan bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak mampu tinggal di dalam Kota Banjarmasin, sehingga mereka pindah ke daerah pinggiran kota yang lokasinya masih sangat dekat dengan Kota Banjarmasin. *Kedua*, dengan makin terbatasnya tanah untuk lahan pemukiman, maka mendorong berkembangnya daerah penyangga atau *hinterland* sebagai daerah pemukiman baru bagi penduduk yang bekerja di Kota Banjarmasin. Kawasan ini disebut *dormitory area*. *Ketiga*, penduduk yang migrasi ke Kota Banjarmasin untuk pekerjaannya mungkin akan memilih tempat tinggal di *dormitory area* karena biaya tempat tinggal yang lebih murah. Penduduk yang bekerja di Kota Banjarmasin tidak hanya penduduk yang bermigrasi dan tinggal di dalam kota, tetapi juga penduduk yang bermigrasi dan tinggal di daerah penyangga atau *hinterland*.

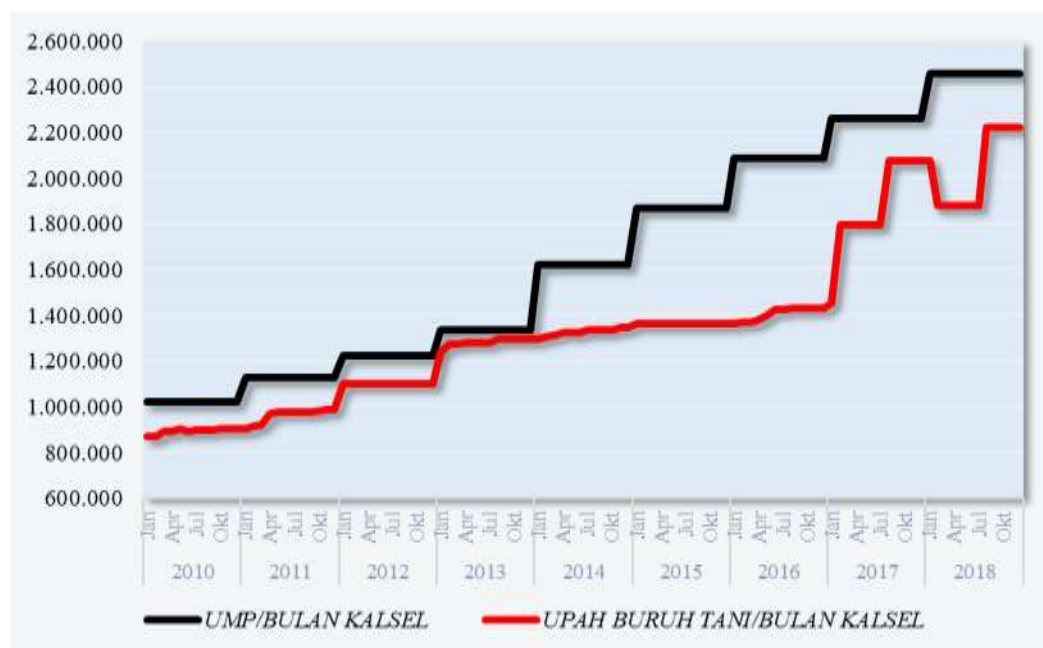
4.2.2.2 Perbedaan Tingkat Upah

Upah di Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai proxy tingkat upah di pedesaan dan upah di perkotaan digunakan proxy upah minimum (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaan tingkat upah dianggap sebagai daya tarik pencari kerja dari pedesaan untuk mencari pekerjaan di Kota Banjarmasin seperti tesis Harris & Todaro (1970). Berbagai penelitian di Indonesia untuk membuktikan tesis Harris dan Todaro tersebut menunjukkan bahwa motif ekonomi merupakan faktor dominan di dalam memutuskan bagi seseorang untuk melakukan migrasi antar daerah maupun antara pedesaan ke perkotaan (Marta et al., 2020; Maulida et al., 2013; Wibisono, 2020).

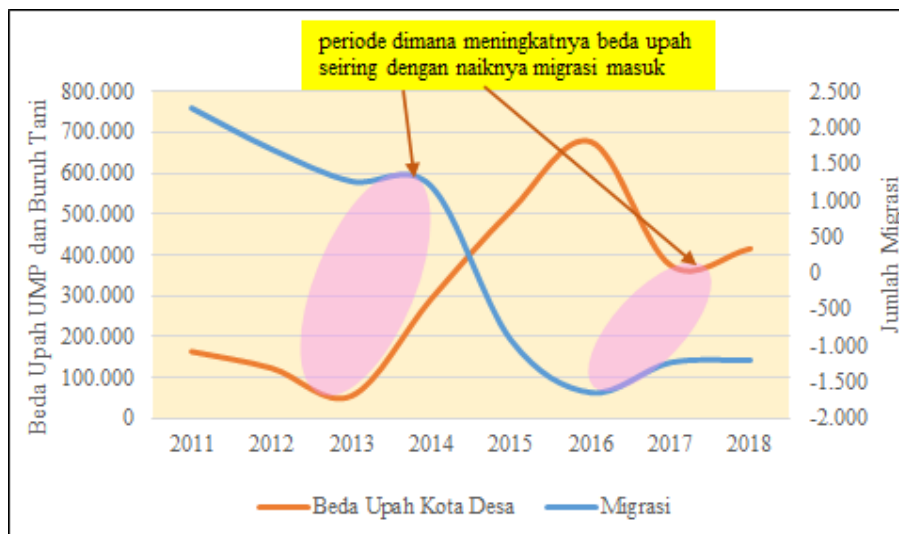
Dari data, memang terjadi perbedaan tingkat upah antara daerah pedesaan dengan tingkat upah di Kota Banjarmasin dari tahun 2010 sampai dengan 2013

dengan kecenderungan mengecil. Namun, sejak tahun 2014, perbedaan tingkat upah di pedesaan dengan tingkat upah di Kota Banjarmasin semakin lebar dengan kecenderungan melebar dan menyempit lagi.

Bila dilihat dari grafik perbedaan upah desa-kota dengan grafik migrasi, sebenarnya pada periode tertentu, migrasi dan beda upah desa-kota seiring. Artinya ada perbedaan upah yang meningkat, maka ada kecenderungan juga migrasi masuk meningkat dan bila perbedaan upah mulai menurun, maka migrasi masuk juga menurun dan malah terjadi migrasi keluar. Untuk lebih jelasnya silakan lihat Grafik 15.



Grafik 15 Perbedaan Upah Buruh Tani di Kalsel dan UMP di Kalsel 2010-2018 (Rupiah)
Sumber: BPS dan berbagai sumber lainnya, diolah



Grafik 16 Perbedaan Upah dan Migrasi
Sumber: BPS dan berbagai sumber, diolah.

4.2.3 Hasil Identifikasi Sektor Pencipta Kesempatan Kerja

4.2.3.1 Elastistas Kesempatan Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu bagian dari faktor-faktor produksi yang terserap ke dalam unit-unit usaha yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Setiap unit produksi tentu memiliki karakteristik yang berbeda dalam pola dan teknologi produksinya. Unit usaha dapat bersifat *labor intensive*, *capital intensive*, *scientific and technological intensive* dan sebagainya. Intensitas penggunaan faktor produksi ini menentukan porsi penyerapan tiap jenis faktor produksi sehingga porsi daya serap tenaga kerja tidak akan sama antar jenis usaha. Secara umum kita dapat membedakan jenis usaha yang menggunakan teknologi yang telatif canggih, seperti berbagai jenis industri pengolahan apalagi yang dilengkapi dengan teknologi robotic dan digital tentu akan menyerap tenaga kerja dengan proporsi yang lebih sedikit dalam skala investasinya dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja yang terjadi di sektor pertanian. Oleh karena itu, disamping besaran pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja di kota Banjarmasin juga ditentukan oleh pola konsentrasi dan perkembangan yang terjadi di sektor-sektor produksi /lapangan usaha.

Tabel 7 Kontribusi Tenaga Kerja dan PDRB Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Banjarmasin Tahun 2014 - 2018

SEKTOR	Kontribusi TK (%)		Perubahan = (2)-(3)	Kontribusi PDRB (%)		Perubahan = (6)-(5)	Selisih = (4)-(7)
	2014	2018		2014	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,33	2,76	1,44	2,55	2,41	-0,15	1,58
Pertambangan dan Penggalian	0,98	0,65	-0,33	-	-	-	-0,33
Industri Pengolahan	6,16	8,79	2,63	19,00	18,02	-0,98	3,61
Listrik, Gas, dan Air	0,67	0,67	0,00	1,44	1,53	0,09	-0,09
Konstruksi/Bangunan	8,46	4,17	4,29	9,84	9,96	0,12	-4,41
Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	42,15	42,99	0,84	15,30	15,63	0,34	0,51
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	11,33	13,85	2,51	16,68	17,24	0,57	1,95
Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	3,13	4,65	1,52	18,93	18,83	-0,10	1,62
Jasa Kemasyarakatan dan Lainnya	25,80	21,48	4,32	16,28	16,38	0,10	-4,42
Total	100,00	100,00		100,00	100,00		

Sumber: BPS, diolah.

Dari Tabel di atas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel berkontribusi dominan dalam menyediakan lapangan kerja dengan porsi 42,15% pada 2014 dan 42,99% pada 2018. Sektor selanjutnya yang berkontribusi terbesar adalah Jasa Kemasyarakatan dan Lainnya dengan 25,80% pada 2014 menjadi 21,48% pada 2018 diikuti oleh sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan 11,33% pada 2014 dan 13,85% pada 2018.

Pada saat yang sama terdapat dua sektor yang memiliki dominasi yang kurang lebih sama dalam pembentukan PDRB Kota Banjarmasin, yaitu Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan di mana masing-masing mempunyai kontribusi antara 18% s/d 19% pada tahun 2014 dan 2018. Sektor dominan selanjutnya adalah Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan kontribusi 16,68% pada 2014 dan 17,24% pada 2018. Tidak jauh di bawah terdapat Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Lainnya dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel yang berkontribusi antara 15,30% sampai 16,38% pada 2014 dan 2018.

Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel telah berkontribusi besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sepanjang 2014 hingga 2018 peranannya

meningkat meskipun hanya sedikit yakni 0,84%. Kemampuan menyerap tenaga kerja ini bahkan relatif lebih tinggi dari peranannya dalam membentuk PDRB, sementara kontribusi sektor ini dalam membentuk PDRB hanya meningkat sebesar 0,34% dari 2014 ke 2018. Jika sektor ini dapat meningkat lebih tinggi maka penciptaan lapangan kerjanya akan jauh lebih besar lagi.

Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor yang berkontribusi terbesar dalam PDRB memiliki peran yang relatif jauh lebih rendah dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDRB pada kurun waktu 2014 s/d 2018 yakni sebesar -0,98%. Kendati demikian, sektor ini mengalami peningkatan terbesar dalam kontribusinya dalam menyediakan lapangan kerja sepanjang 2014 s/d 2018, yakni meningkat sebesar 2,63%. Ini berarti kemampuannya dalam menyediakan lapangan kerja dapat meningkat lebih cepat lagi jika kontribusinya dalam PDRB mengalami peningkatan yang lebih besar.

Tabel 8 Pertumbuhan Tenaga Kerja, PDRB dan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor di Banjarmasin Tahun 2014 – 2018

SEKTOR	Tenaga Kerja (Org)		Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rp.)		Pertumbuhan (%)	Elastisitas
	2014	2018		2014	2018		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.890	8.540	21,72	422,72	507,28	4,66	4,66
Pertambangan dan Penggalian	2.882	2.013	-8,58	0	0	0	0
Industri Pengolahan	18.056	27.160	10,75	3.144,96	3.796,07	4,82	2,23
Listrik, Gas, dan Air	1.970	2.080	1,37	237,62	321,39	7,84	0,17
Konstruksi/Bangunan	24.790	12.873	-15,11	1.628,12	2.098,01	6,54	-2,31
Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	123.559	132.842	1,83	2.531,97	3.293,13	6,79	0,27
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	33.222	42.786	6,53	2.760,41	3.632,32	7,1	0,92
Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	9.168	14.354	11,86	3.133,74	3.967,32	6,07	1,95
Jasa Kemasyarakatan dan Lainnya	75.634	66.360	-3,22	2.694,35	3.449,97	6,38	-0,5
Total	293.171	309.008	1,32	16.553,89	21.065,48	6,21	0,21

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: Elastisitas kesempatan kerja (E) yaitu perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja $\Delta N/N$ dengan laju pertumbuhan ekonomi $\Delta Y/Y$.

Pada Tabel 8, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakan sepanjang 2014 – 2018, maka sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terlihat tumbuh paling tinggi yakni sebesar 21,72%. Penyedia lapangan kerja yang tumbuh tertinggi berikutnya adalah Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan dan Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing 11,86% dan 10,75%.

Pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian yang sangat tinggi ini bisa menjadi indikasi bahwa pencari kerja dari Banjarmasin juga memperoleh pekerjaannya di luar Kota Banjarmasin mengingat lahan pertanian di dalam kota justru semakin sempit. Hal serupa juga terjadi pada tenaga kerja di sektor Pertambangan dan Penggalian yang mana tidak terdapat area operasional pertambangan kecuali kantor administratifnya di Kota Banjarmasin sementara tenaga kerjanya berjumlah lebih dari 2000 orang.

Sektor Konstruksi/Bangunan yang sejalan dengan prioritas pembangunan yang menjadi agenda pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia ternyata belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi tenaga kerja lokal. Sepanjang 2014 – 2018 sektor ini tumbuh minus 15,11%. Hal ini terjadi meskipun pada saat yang sama PDRB Sektor Konstruksi/Bangunan tumbuh positif dengan besaran 6,54%.

Angka elastisitas menunjukkan kepekaan pertambahan kesempatan kerja dalam persen yang terjadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dari Tabel 8 di atas elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun demikian, angka elastisitas khusus Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Pertambangan dan Pengalihan tidak bisa dipertimbangkan dan bias oleh karena lapangan usaha keduanya sebagian berada di luar Kota Banjarmasin. Di samping itu, porsi tenaga kerja di kedua sektor tersebut sangat kecil, sementara lahan pertanian cenderung semakin menyempit dan lahan pertambangan berada di luar Kota Banjarmasin.

Sektor lainnya yang memiliki kepekaan elastis dalam menyerap tenaga kerja adalah Sektor Industri pengolahan dan Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan masing-masing dengan nilai elastisitas 2,33 dan 1,95. Ini berarti jika kedua sektor ini mengalami pertumbuhan dalam nilai PDRB maka sangat berpengaruh signifikan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Interpretasinya, jika terjadi pertumbuhan PDRB sebesar 1% dalam Sektor Industri Pengolahan, maka diperkirakan dapat menciptakan pertumbuhan jumlah lapangan kerja 2,33% di sektor tersebut. Jika terjadi pertumbuhan PDRB sebesar 1% dalam sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan maka diperkirakan dapat menciptakan pertumbuhan jumlah lapangan kerja 1,95% di sektornya sendiri.

Sayangnya selain ketiga sektor tadi, sektor-sektor yang lain memiliki elastisitas yang kurang dari 1 atau inelastis sehingga jika terjadi pertumbuhan PDRB masing-masing sebesar 1% maka hanya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan persentasi yang lebih rendah dari 1%. Sektor ekonomi yang potensial dapat menciptakan jumlah kesempatan kerja paling besar secara absolut adalah Industri pengolahan. Dengan tingkat elastisitas sebesar 2,33 maka setiap

pertumbuhan PDRB sebesar 1% akan menumbuhkan kesempatan kerja 2,33%. Jika jumlah tenaga kerjanya sebesar 27.160 orang (pada 2018) maka dengan pertumbuhan 1% dalam PDRB dapat menciptakan kesempatan kerja sebanyak kurang lebih 605 orang.

4.2.3.2 Multiplier Kesempatan Kerja

Di dalam penciptaan kesempatan kerja, maka teknologi produksi sangat menentukan. Jika teknologi produksi sudah diketahui dengan Tabel Input-Output, maka pembuat kebijakan dapat melakukan berbagai kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat dapat mengarahkan investasi atau belanja modal, belanja rutin, atau kebijakan pajak daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi sehingga bisa menciptakan kesempatan kerja yang besar. Dalam hal ini, hasil perhitungan dari Tabel Input-Output dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang bisa menciptakan kesempatan kerja jika dilakukan intervensi kebijakan fiskal daerah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sektor-sektor yang memiliki angka pengganda (*multiplier*) kesempatan kerja yang tinggi adalah sektor-sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Konstruksi, Jasa-jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Bank dan Lembaga Keuangan. Namun mesti diperhatikan, ada sektor-sektor yang memiliki angka pengganda yang tinggi namun peranannya di lama perekonomian masih kecil dan ini juga terkait dengan jumlah kegiatan yang berorientasi penduduk seperti Listrik, Gas dan Air Minum serta Bank dan Lembaga Keuangan. Arti dari besarnya angka pengganda tersebut adalah jika ada kenaikan permintaan pada sektor tersebut maka dapat diketahui dampak penciptaan kerja di sektor tersebut dan sektor-sektor lainnya secara keseluruhan. Jadi sektor-sektor tersebut memiliki angka pengganda yang besar yang berarti jika ada kebijakan intervensi di sektor tersebut, maka dampaknya akan menciptakan kesempatan kerja yang besar sehingga akan dapat menyerap tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Kota Banjarmasin.

Adapun bentuk intervensi kebijakan yang dapat dilakukan misalnya adalah dengan menaikkan belanja modal atau investasi di sektor tersebut. Selain itu, kebijakan insentif fiskal daerah, misalnya memberikan keringanan PBB bagi investasi tertentu yang menciptakan kesempatan kerja dengan jumlah penyerapan kesempatan kerja dengan jumlah tertentu atau berbagai kemudahan di dalam

membuka investasi baru. Namun, berdasarkan angka pengganda saja kurang mencukupi, karena perlu juga diketahui apakah peranan sektor tersebut di dalam perekonomian cukup besar.

Tabel 9 Multiplier Kesempatan Kerja Perekonomian Kota Banjarmasin

Sektor	Type I	Type II
Pertanian	1.1130	1.4029
Pertambangan	0.0000	0.0000
Industri Pengolahan	2.3506	3.6570
Listrik, Gas & Air Minum	5.0832	8.4879
Konstruksi	3.1666	5.0098
Perdagangan, Rest.& Hotel	1.1894	1.3952
Angkutan & Komunikasi	1.7326	2.3313
Lembaga Keuangan	1.2870	1.5686
Jasa-Jasa	1.0159	1.4310

Sumber: Tabel Input-Output 2019, updating dari Tabel IO Kota Banjarmasin 2015, FEB ULM.

4.2.4 *Postscript* Dampak Pandemi Covid 19

Pandemi covid 19 menimbulkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia, nasional dan daerah. Dengan adanya pandemi ini, maka ekonomi Kota Banjarmasin sangat terdampak terutama sektor-sektor seperti Perhotelan, Restoran, Angkutan Udara, Darat dan Laut, Perdagangan Besar dan Eceran. Oleh karena itu, tingkat pengangguran langsung meningkat karena banyak perusahaan perhotelan yang merumahkan (*lay off*) para karyawan mereka, karena sebagian besar hotel-hotel berhenti beroperasi akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, termasuk Kota Banjarmasin untuk memutus rantai penularan pandemi covid 19. Sementara sektor lainnya seperti Restoran dan Rumah Makan juga langsung mengalami penurunan penjualan akibat diminta untuk tidak menyediakan makan di tempat, tetapi hanya berjualan untuk dibawa pulang atau melalui pengantaran.

Dampak dari adanya covid 19 dengan seperangkat Kebijakan Pembatasan Berskala Sosial Besar (PSBB) untuk daerah-daerah tertentu memberi dampak kegiatan ekonomi semakin terbatas.

4.2.5 Simulasi Sisi Permintaan

Untuk melihat dampak covid 19, Tim Peneliti melakukan simulasi dengan menggunakan Tabel Input-Output yang sudah dibuat yaitu dengan asumsi-asumsi di dalam Kotak 2. Dari hasil simulasi, maka kesempatan kerja yang hilang atau pengangguran akan bertambah sebesar 21,791 orang dengan skenario ringan. Rinciannya adalah pada putaran pertama, Sektor Perdagangan, Restoran & Hotel melepaskan tenaga kerja sebesar 11.392 orang yang bekerja akibat covid 19, kemudian pada putaran berikutnya bertambah 1.385 orang yang kehilangan pekerjaan dan putaran berikutnya 2.062 orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi total di sektor Perdagangan, Restoran & Hotel saja ada 14,840 orang yang kehilangan pekerjaan. Itu belum termasuk sektor lainnya yang terkait dengan sektor Perdagangan, Restoran & Hotel. Sedangkan di sektor Angkutan & Komunikasi terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 4.146 orang secara total dengan rincian pada putaran pertama berkurang sebesar 2.529 dan putaran kedua berkurang sebesar 975 dan putaran ketiga sebesar 641 orang. Untuk rincian per sektor, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Kotak 2: Asumsi Simulasi Potensi Dampak Covid 19

Di dalam melakukan simulasi untuk mengetahui potensi dampak adanya covid 19, maka Tim melakukan 3 skenario dengan membuat shock adanya penurunan permintaan untuk sector-sector terdampak paling serius yaitu sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel dan Sektor Angkutan dan Komunikasi yang berdasarkan data BPS mengenai pertumbuhan Produk Domestik Bruto triwulan 1 2020 yang menunjukkan bahwa sector- yang terdampak paling parah adalah kedua sektor tersebut.

Skenario 1 Shock Penurunan Permintaan Ringan

- Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel -15% dari PDRB 2019
- Sektor Angkutan dan Komunikasi -10% dari PDRB 2019

Skenario 2 Shock Penurunan Permintaan Moderate

- Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel -30% dari PDRB 2019
- Sektor Angkutan dan Komunikasi -10% dari PDRB 2019

Tabel 10 Dampak Simulasi Covid 19 Terhadap Kesempatan Kerja Kasus Ringan

Sektor	Final Demand	Industrial Support	Consumption	Total	Percent	Flow-on	Percent
Pertanian	0	-35	-161	-196	1	-196	2
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	0	-87	-284	-371	2	-371	5
Listri, Gas & Air Minum	0	-50	-41	-91	0	-91	1
Konstruksi	0	-56	-12	-67	0	-67	1
Perdagangan, Rest.& Hotel	-11.392	-1.386	-2.062	-14.840	68	-3.448	44
Angkutan & Komunikasi	-2.530	-975	-642	-4.147	19	-1.617	21
Lembaga Keuangan	0	-684	-161	-845	4	-845	11
Jasa-Jasa	0	-738	-496	-1.233	6	-1.233	16
Total	-13.922	-4.011	-3.858	-21.791	100	-7.870	100

Sumber: Perhitungan Tim Peneliti

Sedangkan jika kasus moderate yaitu dengan memperbesar *shock* turunnya permintaan, maka jumlah yang akan kehilangan pekerjaan adalah 37.686 orang. Sedangkan rinciannya dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11 Dampak Simulasi Covid-19 Terhadap Kesempatan Kerja Kasus Moderate

Sektor	Final Demand	Industrial Support	Consumption	Total	Percent	Flow-on	Percent
Pertanian	0	-66	-259	-325	1	-325	3
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	0	-145	-457	-601	2	-601	5
Listri, Gas & Air Minum	0	-84	-66	-150	0	-150	1
Konstruksi	0	-90	-19	-108	0	-108	1
Perdagangan, Rest.& Hotel	-22.784	-2.164	-3.315	-28.263	75	-5.479	44
Angkutan & Komunikasi	-2.530	-1.409	-1.032	-4.971	13	-2.441	20
Lembaga Keuangan	0	-1.163	-259	-1.421	4	-1.421	11
Jasa-Jasa	0	-1.049	-797	-1.846	5	-1.846	15
Total	-25.314	-6.169	-6.202	-37.686	100	-12.372	100

Sumber: Perhitungan Tim Peneliti

Dengan melihat potensi dampak covid 19 terhadap kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 akan meningkat drastis bila simulasi ini menjadi nyata.

4.2.6 Strategi Penciptaan Kesempatan Kerja Pasca Pandemi

Dengan adanya pandemi covid 19, tingkat pengangguran bertambah sangat signifikan, di mana jika diasumsikan kasus ringan, maka akan terjadi peningkatan pengangguran sebesar 21.791. Jumlah ini cukup besar dan harus bisa diserap pasca

pandemi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang di luar kebijakan normal. Hal ini karena pengangguran yang meningkat akibat covid 19 menjadi persoalan tersendiri.

Di dalam menciptakan kesempatan kerja pasca pandemi atau beradaptasi dengan pandemi jika memang pandemi tidak berangsur surut, maka berbagai program kebijakan fiskal daerah dan pusat yang memberikan berbagai insentif fiskal seperti memberikan bantuan kepada UMKM dan berbagai penanguhan perpajakan bagi usaha terdampak covid 19, bantuan sosial kepada keluarga miskin dan terdampak.

Di dalam strategi penciptaan kesempatan kerja, kegiatan ekonomi yang harus ditingkatkan adalah pada sektor-sektor yang menciptakan kesempatan kerja yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, dan sektor angkutan yang mendukung perdaganga. Sektor angkutan dan logistik akan ikut mendukung sektor perdagangan yang di masa depan akan lebih banyak bersifat daring atau *online*.

4.2.7 Strategi Penciptaan Kerja

Diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dapat berangsur mulai meningkat dengan asumsi pada Tabel berikut, bila pandemi covid19 dapat dikendalikan. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi dengan asumsi shock yang ringan, maka terjadi kontraksi sebesar -4,5%.

Jika pandemi Covid-19 dapat dikendalikan, maka diasumsikan pertumbuhan pada tahun 2021 adalah sebesar 6,21% dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Asumsi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Riil Tahun 2020-2025

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian	-3.6%	3.4%	3.0%	3.0%	3.0%	2.5%
Pertambangan	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Industri Pengolahan	-3.6%	4.0%	4.5%	6.0%	7.0%	7.0%
Listri, Gas & Air Minum	-3.4%	7.5%	7.5%	7.5%	7.0%	6.5%
Konstruksi	-3.2%	7.0%	8.0%	8.0%	8.0%	7.5%
Perdagangan, Rest.& Hotel	-7.0%	7.5%	7.7%	8.0%	8.5%	9.0%
Angkutan & Komunikasi	-6.0%	5.0%	6.0%	6.0%	7.0%	7.5%
Lembaga Keuangan	-3.4%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
Jasa-Jasa	-4.2%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	7.0%
Total	-4.5%	6.2%	6.6%	6.9%	7.3%	7.4%

Sumber: Asumsi Tim Peneliti

Asumsi tersebut dibuat dengan strategi mengembangkan sektor industri pengolahan terutama industri kecil sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Karena sektor ini relatif cukup besar peranannya di dalam perekonomian. Selain itu, multiplier kesempatan

kerja juga tinggi. Dengan mengembangkan sektor-sektor yang banyak menampung tenaga kerja, dan besar peranannya di dalam perekonomian dimana juga multiplier kesempatan kerjanya juga tinggi, maka sektor-sektor ini patut dijadikan sektor andalan di dalam strategi penciptaan kesempatan kerja di masa datang. Sektor-sektor yang dijadikan andalan untuk menjadi motor penggerak perekonomian di Kota Banjarmasin adalah sektor harus tumbuh di atas rata-rata target pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh peningkatan investasi di sektor tersebut baik dari belanja modal pemerintah maupun dari investasi sektor swasta. Selain itu, berbagai kemudahan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin harus sejalan dengan kemudahan di dalam membuka usaha baru. Dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Banjarmasin harus memberikan perhatian untuk investasi di bidang sumber daya manusia dengan memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan berbagai kursus dan pelatihan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Strategi mengembangkan sektor perdagangan yang di masa depan adalah sektor yang akan dikembangkan berbasis daring atau *online* yang pada masa pandemi sudah mulai jadi kebutuhan mutlak sehingga Pemerintah Daerah sudah selayaknya menyediakan pelatihan dan penyediaan infrastrukturnya seperti *market place* yang bersifat lokal. Jadi proses disrupsi ini terjadi bukan karena teknologi, namun karena pandemi dimana sejalan dengan perkembangan teknologi yang tersedia dan dipakai di negara maju dan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Para pedagang dipaksa oleh situasi pandemi untuk menggunakan sistem berdagang daring atau *online*. Disini peranan Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dan penyedia pelatihan serta menyediakan infrastruktur seperti *marketplace*.

Dari asumsi tingkat pertumbuhan yang bertumpu pada sektor industri pengolahan yang umumnya industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin, sektor perdagangan, rumah makan dan hotel serta sektor angkutan dan logistik selain sektor jasa-jasa yang lain merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar. Ketiga sektor tersebut saling berkaitan erat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarmasin. Strategi penciptaan kerja dengan motor pertumbuhan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier yang tinggi dan peranan yang besar di dalam perekonomian tersebut akan menciptakan kesempatan kerja yang sangat besar sehingga dapat menyerap pengangguran dan angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja, baik yang lokal maupun yang berasal dari luar Kota Banjarmasin.

4.2.8 Simulasi Penciptaan Kesempatan Kerja

Untuk menciptakan kesempatan kerja setelah pandemi atau pandemi dapat dikendalikan penularan pada tingkat yang sesuai dengan standar WHO, maka strateginya adalah memilih motor pertumbuhan pada sektor yang memiliki multiplier kesempatan kerja yang tinggi dan memiliki peranan yang cukup besar seperti telah dibahas di bagian sebelumnya. Dengan strategi yang tepat, maka penciptaan kesempatan kerja akan meningkat sangat signifikan. Pengendalian pandemi tentu menjadi syarat mutlak bagi kegiatan ekonomi dapat mulai bergerak sehingga penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan suatu keharusan.

Rincian penyerapan kesempatan kerja per sektor dengan strategi yang telah dikemukakan di atas dan diturunkan di dalam asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin sejak tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Dapat dilihat bahwa sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Rest.& Hotel, dan Angkutan & Komunikasi serta sektor Lembaga Keuangan memiliki penciptaan kesempatan kerja yang tinggi. Dengan strategi yang tepat yaitu memberikan perhatian pada sektor yang memiliki multiplier kesempatan kerja yang tinggi, maka diharapkan dengan kebijakan yang tepat yaitu memfasilitasi dan intervensi kebijakan bila dalam hal ini Pemerintah Kota tak dapat melakukan intervensi langsung, maka sektor-sektor tersebut akan memancing investasi dengan memberikan berbagai kebijakan yang memudahkan investor untuk membuka usaha di Kota Banjarmasin sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akan menciptakan kesempatan kerja.

Di dalam hasil simulasi ini, memang angkanya ada kecenderungan *overestimate*. Hal ini kemungkinan karena masalah data di dalam membuat tabel input-output mungkin kurang begitu akurat. Oleh karena itu, interpretasi harus dilakukan secara hati-hati. Untuk itu diperlukan kajian lebih mikro untuk lebih mendalami permasalahan penciptaan kesempatan kerja ini. Apalagi kemajuan teknologi saat ini umumnya menciptakan proses produksi yang semakin hemat tenaga kerja yang digantikan oleh mesin-mesin. Jadi teknologi yang lebih padat modal dan dengan mesin yang biayanya jauh lebih murah dan efisien. Jadi tabel Input-output yang tersedia saat ini yang digunakan masih mencerminkan teknologi beberapa tahun lalu, yang di masa datang sudah berubah teknologi produksinya yang hemat tenaga kerja. Namun demikian, angka penciptaan kesempatan kerja di dalam simulasi ini dapat dipakai sebagai sebagai indikasi di dalam magnitudnya.

Tabel 13 Penyerapan Kesempatan Kerja Sesuai Dengan Strategi Pertumbuhan Sektor Andalan 2020-2025

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian	-196	610	683	774	879	976
Pertambangan	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-371	1,772	2,036	2,444	2,866	3,189
Listri, Gas & Air Minum	-91	331	372	416	458	501
Konstruksi	-67	838	1,006	1,118	1,246	1,333
Perdagangan, Rest.& Hotel	-14,840	15,263	17,349	19,690	22,676	25,999
Angkutan & Komunikasi	-4,147	4,868	5,730	6,377	7,491	8,554
Lembaga Keuangan	-845	5,706	6,395	7,134	7,985	8,890
Jasa-Jasa	-1,233	8,811	9,737	10,702	11,832	14,070
Total	-21,791	38,200	43,308	48,655	55,432	63,510

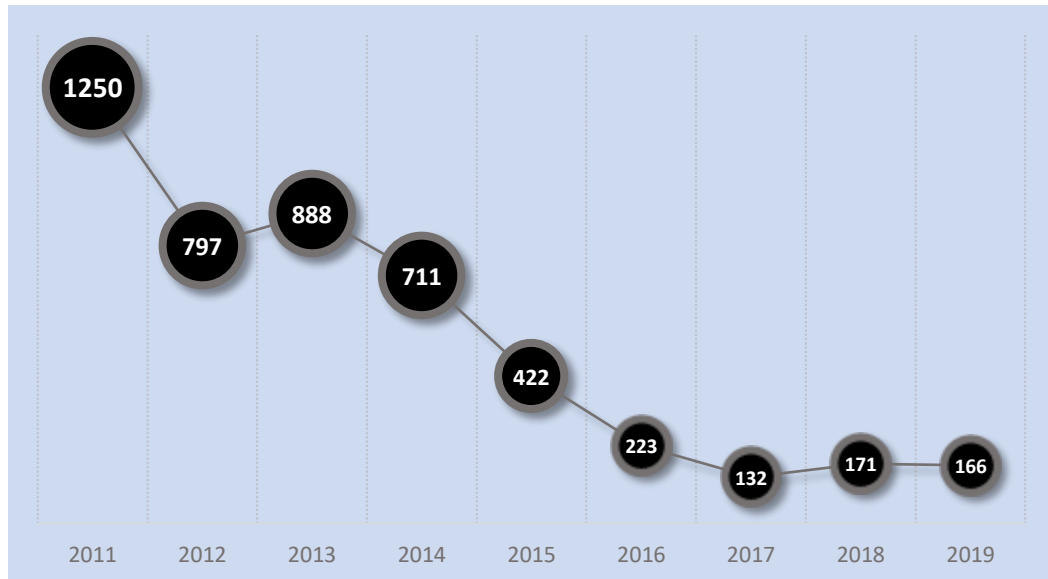
Sumber: Hasil Simulasi Tim Peneliti.

4.2.9 Kesempatan Kerja di Luar Negeri

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah merupakan program yang dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah pengangguran, melalui kesempatan kerja di luar negeri para PMI diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan terutama bagi keluarga yang ditinggalkan melalui remitansi yang diterimanya.

4.2.9.1 Profil Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan

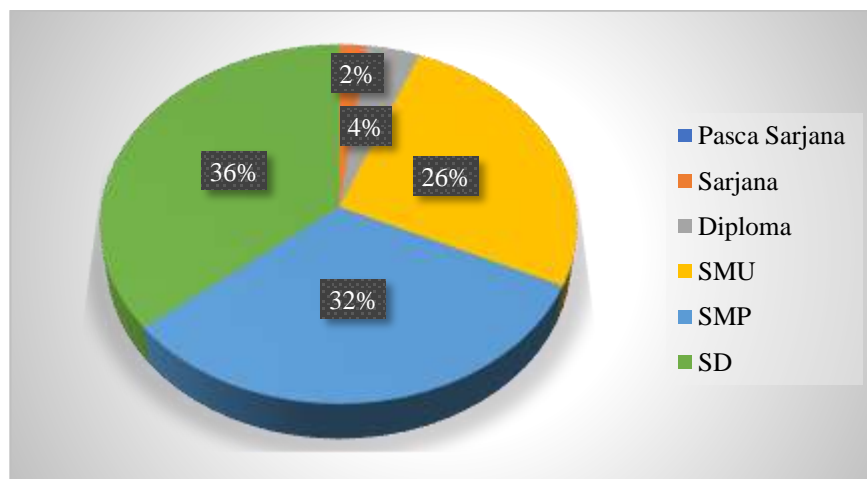
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang menurun, meskipun demikian dalam 2 tahun terakhir sudah mulai bergerak naik. Peluang bekerja ke luar negeri bagi PMI Kota Banjarmasin relatif besar, karena hanya sebesar 0,06% dari PMI Nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tahun 2019 berada di urutan ke-26 dengan 166 pekerja terhadap PMI Nasional 276.553 pekerja, yang terbesar berasal dari Kabupaten Tanah Laut 27,71% (46 pekerja), sedangkan PMI dari Kota Banjarmasin hanya sebesar 9,64% (16 pekerja).



Grafik 17 Jumlah Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : PUSLITFO BNP2TKI

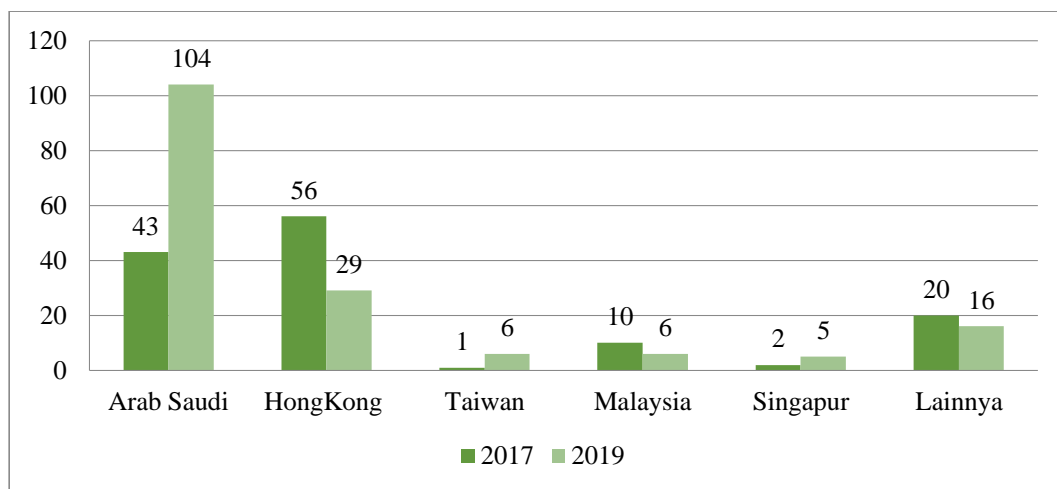
Para PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal Kalimantan Selatan berdasarkan sektor usaha sebanyak 123 pekerja bekerja pada sektor formal dan 43 pekerja pada sektor non formal, sebagian besar PMI Kalimantan Selatan tahun 2019 bekerja sebagai PRT dan Pengasuh (*female cleaner* 78 orang, *domestic worker* 37 orang, *worker* 8 orang dan *caregiver* 7 orang). Pekerjaan ini relatif tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, yang tergambar pada data tingkat pendidikan PMI Kalimantan Selatan yang terbanyak adalah lulusan SMP ke bawah sebesar 68%, secara keseluruhan tingkat pendidikan PMI adalah sebagai berikut.



Grafik 18 Tingkat Pendidikan PMI Kalimantan Selatan Tahun 2019

Sumber: PUSLITFO BNP2TKI

Negara penempatan PMI asal Kalimantan Selatan dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, terbanyak adalah di Arab Saudi, Hongkong, dan Malaysia, berikut perbandingan daerah penempatan PMI Kalimantan Selatan tahun 2017 dan 2019, terlihat bahwa Arab Saudi dan Hongkong adalah negara penempatan terbanyak PMI Kalimantan Selatan



Grafik 19 Negara Penempatan PMI Kalimantan Selatan 2017-2019

Sumber: (PUSLITFO BNP2TKI, 2020)

4.2.9.2 Peluang Kerja PMI Kota Banjarmasin

Peluang kerja bagi PMI termasuk Kota Banjarmasin yaitu banyaknya kesempatan/peluang kerja yang ditawarkan oleh negara lain, berdasarkan data yang diperoleh dari PUSLITFO BNP2TKI. Peluang kerja bagi PMI adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Kesehatan (perawat dan bidan profesional)
- b. Bidang Konstruksi (Insinyur, tukang las, tukang kayu, operator alat berat, dan konstruksi bangunan, jalan, jembatan)
- c. Bidang *Hospitality Sea Based, Land Based*
- d. Manufaktur (Insinyur, tukang las, tukang kayu, dan konstruksi bangunan, jalan, jembatan)

Peluang kerja terbesar ke luar negeri adalah ke Negara Jepang dengan berbagai jenis keahlian, selain itu juga ada dari negara lainnya, berikut peluang kerja yang ditawarkan oleh berbagai negara disajikan pada Tabel berikut.

Untuk mengisi kesempatan/peluang bekerja di luar negeri, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi, semakin tinggi gaji atau upah yang diharapkan

biasanya persyaratan yang harus dipenuhi juga semakin banyak, berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PMI sebagai berikut :

- a. Pengalaman
- b. Lisensi/sertifikasi khusus Profesi
- c. Kemampuan bahasa Inggris

4.2.9.3 Potensi PMI Kota Banjarmasin

Kemampuan PMI Kota Banjarmasin untuk mengisi peluang kerja ke luar negeri relatif besar, hal ini tergambar pada banyaknya lulusan yang akan selesai mengikuti pendidikan formal di level SMA, Diploma dan Sarjana sesuai dengan peluang kerja yang ditawarkan negara lain, untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan peluang kerja ke luar negeri, BP3TKI Banjarbaru yang telah melakukan pemetaan potensi dan pendataan supply PMI Kalimantan Selatan, dan diolah berdasarkan potensi yang bersumber dari Kota Banjarmasin sebagai berikut.

Tabel 14 Peluang Kerja di Berbagai Negara

Negara	Dicari	Kebutuhan Pekerja
Singapura	Asisten Perawat di rumah	200 /tahun
Hongkong	<i>Nurse</i>	20.000 sd 5 tahun
	<i>Caregiver</i>	200.000 sd 5 tahun
	<i>Care worker</i>	60.000
	<i>Building cleaning management</i>	37.000
	<i>Machine Parts & Tooling Industries</i>	21.500
	<i>Industrial machinery industri</i>	5.250
	<i>Electric, Electronics and Information Industries</i>	4.700
	<i>Construction Industry</i>	40.000
Jepang	<i>Shipbuilding and Ship Machinery Industry</i>	13.000
	<i>Automobile repair and maintenance</i>	7.000
	<i>Aviation Industry</i>	2.200
	<i>Accommodation Industry</i>	22.000
	<i>Agriculture</i>	36.500
	<i>Fishery & Aquaculture</i>	9.000
	<i>Manufacture of food and beverages</i>	34.000
	<i>Food service industri</i>	53.000
Amerika Serikat	Perawat berlisensi	1.000/tahun
	Perawat berlisensi utk RS	
Qatar	Perawat berlisensi utk RS	100
Arab Saudi	Perawat	
Kuwait	Perawat	
Uni Emirat Arab	Perawat	
Belanda	Perawat	

Sumber : PUSLITFO BNP2TKI

Tabel 15 Potensi PMI berdasarkan Jumlah Mahasiswa dan Siswa tahun 2019

Kualifikasi	Keahlian	Jumlah Lulusan
Sarjana (S1) Bidang Pertanian	Proteksi Tanaman	9
	Preteksi Tanah	9
	Agronomi	1
	teknologi industri Pertanian	47
	Agroeko Teknologi	50
	Peternakan	23
	Agribisnis	74
Sarjana (S1) Bidang Teknik	Teknik Sipil	134
	Arsitektur	72
	Teknik Kimia	31
	Teknik Lingkungan	85
	Teknik Mesin	117
	Teknologi Informasi	5
	Teknik Pertambangan	105
Tenaga Kesehatan	D3- Farmasi	122
	D3-Kebidanan	76
	D3-Keperawatan	525
	D4-Keperawatan	231
	S1- Keperawatan	123
	S2-Keperawatan	4
	Profesi Keperawatan	132
SMK	Otomatisasi dan Tata Kelola	45
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	85
	Bisnis Daring dan pemasaran	90
	Pekerjaan Sosial	95
	Seni Broadcasting dan Film	108
	Produksi Film	72
	Seni Rupa/Animasi	
	Design Interior dan Teknik	72
	Akuntansi	18
	Bisnis Daring dan pemasaran	40

Sumber: Pemetaan Potensi dan Pendataan Supply BP3TKI Banjarbaru (diolah)

4.2.9.4 Kendala Kesempatan Kerja di Luar Negeri

Kesempatan/pekerjaan di luar negeri memiliki persyaratan untuk mengisinya. Kendala yang dihadapi saat ini dapat diinventarisasi adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga pendidikan tidak ada yang secara khusus menyiapkan lulusannya untuk bekerja ke luar negeri dimana dapat diketahui dari tidak adanya kelas internasional pada sekolah yang di data.

- b. Lembaga sertifikasi (lisensi) masih terbatas dan membayar (*high cost*), sehingga tidak semua lulusan dari lembaga pendidikan memiliki sertifikasi profesi.
- c. Kemampuan berbahasa Inggris yang juga masih sangat terbatas.

4.2.10 Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Peluang/Kesempatan Kerja ke Luar Negeri

Penyebaran virus Covid 19 yang dinyatakan sebagai pandemi juga berdampak terhadap peluang/kesempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan seperti hasil *indepth interview* yang dilakukan tim peneliti dengan narasumber dari BNP2TKI, yaitu penghentian sementara pelayanan penempatan PMI ke negara-negara tujuan penempatan, melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.151 Tahun 2020, penundaan pemberangkatan calon PMI ke negara tujuan penempatan, pengosongan tempat pelatihan/Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) dan pemulangan peserta pelatihan PMI ke daerah asal.

Aturan tersebut berdampak pada pemulangan peserta pelatihan PMI ke daerah asal seperti 7 orang perawat dan perawat lansia tujuan Jepang yang sedang pelatihan di Jakarta dan 4 orang yang pelatihan di Jawa Timur tujuan Hongkong. Sampai saat ini, tidak ada pemulangan PMI asal Kalimantan Selatan dari luar negeri.

Ketidakpastian perekonomian dunia dan kapan berakhirnya pandemi covid 19 ini juga berdampak pada terjadinya ketidakpastian atas peluang/kesempatan kerja untuk tahun 2021 seperti halnya untuk program-program reguler tahunan ke Jepang dan Korea Selatan dimana belum ada informasi kepastian apakah tetap akan dibuka atau ditangguhkan.

4.2.11 Kesimpulan

Secara umum tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin yang tinggi disebabkan oleh perkembangan yang pesat Kota Banjarmasin yang menarik para kerja dari daerah lain. Hal ini ditunjukkan oleh data migrasi masuk yang positif sebelum tahun 2015. Walaupun, setelah tahun 2015, terjadi migrasi netto yang negatif yang berarti lebih banyak penduduk yang keluar daripada yang masuk, maka fenomena ini dapat dijelaskan dengan tingginya pertumbuhan

penduduk di kecamatan-kecamatan di daerah yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin yang tumbuh di atas pertumbuhan tingkat kabupaten dari kecamatan tersebut.

Sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi adalah sektor-sektor yang memang selama ini merupakan sektor yang dominan pembentuk struktur perekonomian Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, terbatasnya lapangan kerja di Kota Banjarmasin yang dicerminkan dengan tingginya angka pengangguran terbuka yang tinggi dapat disiasati dengan penciptaan kesempatan kerja yang tinggi pada sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja dengan kebijakan yang tepat. Selain dari penciptaan kesempatan kerja pada sektor-sektor yang memiliki elastistas yang tinggi dan sektor-sektor yang memiliki *multiplier* yang tinggi, maka peluang kerja di negara lain juga tersedia. Namun, peluang kerja tersebut, kadang tidak dapat dimanfaatkan karena persyaratan yang diminta umumnya tidak dapat dipenuhi oleh para pencari kerja yang ada.

Terjadinya pandemi covid 19 sejak awal Maret yang berawal di Jakarta dan kemudian menyebar sampai ke Banjarmasin memupuskan harapan untuk menciptakan kesempatan kerja. Malah dengan adanya wabah covid 19, terjadi arus pemutusan hubungan kerja yang besar di mana dengan simulasi yang ringan saja, wabah ini menciptakan pengangguran baru sekitar 21 ribu orang.

Untuk menciptakan kesempatan kerja, diperlukan strategi yang tepat yaitu sektor-sektor yang dapat dijadikan andalan di dalam menciptakan kesempatan kerja. Strategi tepat didasarkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier kesempatan kerja yang tinggi sehingga sektor-sektor ini dipacu untuk tumbuh tinggi atau tumbuh di atas rata-rata sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, rumah makan & hotel, sektor angkutan dan logistik. Sektor-sektor tersebut sejalan dengan perkembangan di era disrupsi yaitu mengembangkan sektor perdagangan berbasis daring dan dibantu sektor angkutan dan logistik yang juga menjadi tulang punggung system penjualan daring atau online.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Kajian Tingkat Pengangguran Kota di Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Penyebab tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin adalah tidak sesuainya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
2. Sektor yang dijadikan prioritas dalam rangka menyerap tenaga kerja di Kota Banjarmasin adalah sektor-sektor yang memiliki angka pengganda (*multiplier*) kesempatan kerja yang tinggi adalah sektor-sektor industri pengolahan, Jasa-jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Bank dan Lembaga Keuangan.
3. Strategi yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah TPT di Kota Banjarmasin adalah menciptakan kesempatan kerja pasca pandemi atau beradaptasi dengan pandemi jika memang pandemi tidak berangsur surut, maka berbagai program kebijakan fiskal daerah dan pusat yang memberikan berbagai insentif fiskal seperti memberikan bantuan kepada UMKM dan berbagai penanguhan perpajakan bagi usaha terdampak covid 19, bantuan sosial kepada keluarga miskin dan terdampak.
4. Simulasi dan prediksi capaian terhadap penurunan TPT di Kota Banjarmasin Periode 2021-2025 adalah dengan cara stimulasi sisi permintaan dan stimulasi penciptaan kesempatan kerja.
5. Pandemi covid 19 menambah pengangguran yang cukup signifikan, dan berdasarkan simulasi dengan kasus ringan, maka akan menambah pengangguran sebesar 21.791 orang atau meningkatkan pengangguran.

5.2 Rekomendasi

Dengan melihat kondisi dan menganalisis data-data yang tersedia dan simulasi, rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi tingginya Angka Pengangguran Terbuka, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu strategi pertumbuhan yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi.
2. Strategi untuk memacu pertumbuhan itu adalah memilih sektor yang dijadikan prioritas dalam rangka menyerap tenaga kerja di Kota Banjarmasin adalah pada Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Angkutan dan Logistik serta berbagai sektor Jasa yang lain.
3. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor Industri Pengolahan dengan meningkatkan kualitas hasil industri pengolahan dan pendalaman struktur industri
4. Perbaiki struktur perdagangan dengan menyediakan tempat yang nyaman dan menarik baik bagi pedagang maupun pelanggan serta menyediakan market place untuk memperluas paparan para pedagang untuk berdagang secara daring, menyediakan informasi hotel dan restoran yang memberikan beberapa paket wisata di Banjarmasin secara daring, dan bekerja sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan dalam mendukung system pemabayaran daring dan non tunai untuk perdagangan daring.
5. Untuk membantu meningkatkan kualitas SDM yang berminat kerja di negara lain, guna mengatasi masalah TPT di Kota Banjarmasin adalah kolaborasi antar sektor dengan dukungan pemerintah dengan memberikan Pelatihan Lisensi/Sertifikasi khusus Profesi dan Kemampuan Bahasa Inggris.
6. Perbaiki dan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai Perda yang ada untuk membatasi penularan Pandemi covid-19 pada sektor-sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Sektor Angkutan dan Komunikasi sehingga sektor tersebut masih dapat beraktivitas dalam rangka mengurangi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. S., & Khan, M. R. K. (2015). *Employment and Unemployment Situation in Bangladesh: A Dismal Picture of Development*.
- Ali, Y., Sabir, M., & Muhammad, N. (2019). A Comparative Input-Output Analysis of The Construction Sector in Three Developing Economies of South Asia. *Construction Management and Economics*, 37(11), 643–658. <https://doi.org/10.1080/01446193.2019.1571214>
- Anas, R., Tamin, O. Z., & Wibowo, S. S. (2015). Applying Input-Output Model to Estimate The Broader Economic Benefits of Cipularang Tollroad Investment to Bandung District. *Procedia Engineering*, 125, 489–497. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.042>
- Armar-Klemesu, M. (2001). Urban Agriculture and Food Security, Nutrition and Health. In *AGRIS*. <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=NL2001003056>
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2010-2035*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Publikasi Proyeksi Penduduk 2015-2045.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018.
- BPS Kalimantan Selatan. (2011). *Tabel Input Output 2010 Kalimantan Selatan*
- BPS Kota Banjarmasin. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
- BPS Kota Banjarmasin. (2019). *Profil Tenaga Kerja Kota Banjarmasin 2018*. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2019). *Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2019*.
- Chowdhury, M. S. R., & Hossain, M. T. (2014). Determinants of Exchange Rate in Bangladesh: A Case Study. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(1), 78–81.
- Domene, E., Saurí, D., & Parés, M. (2005). Urbanization and Sustainable Resource Use: The Case of Garden Watering in the Metropolitan Region of Barcelona. *Urban Geography - URBAN GEOGR*, 26, 520–535. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.26.6.520>
- Edward L., G., & Gottlieb D., J. (2009). The Wealth of Cities: Agglomeration Economies and Spatial Equilibrium in the United States. In *State of the world's cities 2010/2011* (No. 14806; NBER Working Paper Series). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Effendi, T. (1992). *Sumber Daya Manusia di Indonesia: Analisis Data Sensus*.
- Falk, I. (2001). Challenges Facing Rural Regional Australia in New Times. In I. Falk (Ed.), *Learning To Manage Change* (pp. 3–12). National Centre for Vocational Education Research Ltd.
- Frenkel, R., & Ros, J. (2006). Unemployment and the Real Exchange Rate in Latin America. *World Development*, 34(4), 631–646. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.09.007>
- Furuoka, F., & Munir, Q. (2014). Unemployment and Inflation in Malaysia: Evidence from Error Correction Model. *Malaysian Journal of Business and Economics*, 1(1), 35–45.
- Gallegati, M., Giammetti, R., & Russo, A. (2019). Key Sectors in Input-Output Production Networks: An Application to Brexit. *SSRN Electronic Journal*, 92559. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3347545>
- Glaeser, E. L., Kolko, J., & Saiz, A. (2001). Consumer city. *Journal of Economic Geography*, 1(1), 27–50.
- Gorter, C., & Nijkamp, P. (2015). Location Theory. In *Elsevier Ltd.* (pp. 287–292). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.72029-0>
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). *Migration , Unemployment and Development : A Two-Sector Analysis*. 60(1), 126–142.
- Henderson, J. V., & Wang, H. G. (2005). Aspects of the rural-urban transformation of countries. *Journal of Economic Geography*, 5(1), 23–42. <https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh052>
- Hussain, N. E., Abdullah, N., & Abdullah, H. (2014). The Relationship between Rural-Urban Migration, Household Income and Unemployment: Malaysia Case Study. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 2(8), 17–24.
- Imansyah, M. H., Muzdalifah, & Muttaqin, H. (2019). *Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Imsar. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 145–163.
- Jones, G., & Mulyana, W. (2015). UNFPA Indonesia Monograph Series: Urbanization in Indonesia. In *UNFPA Indonesia* (Issue 4).
- Kasanah, Y. T., Hanim, A., & Suswandi, P. E. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7727>
- Kitov, I. O. (2006). *Inflation, Unemployment, Labor Force Change in the USA*.
- Koont, S. (2009). *The Urban Agriculture of Havana*.

- Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499.
- Kumar, A. (2016). Unemployment Main Problem of Indian Society. *International Journal of Advanced Educational Research*, 1(2), 49–52.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makro Ekonomi* (Terjemahan).
- Mardianto, S., & Syafa'at, N. (1998). Dinamika Ketenagakerjaan dan Kesempatan Berusaha di Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 16(2).
- Marta, J., Fauzi, A., Juanda, B., & Rustiadi, E. (2020). Migrasi Desa-Kota di Indonesia: “Risk Coping Strategy VS Investment.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 160–173. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.1337>
- Maulida, Y., Ilmu, J., Prodi, E., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Riau, U., Bina, K., Km, W., Baru, S., & Abstrak, P. (2013). Pengaruh Tingkat Upah terhadap Migrasi Masuk di Kota Pekanbaru. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 21).
- Moon, C. (2019). *Urban Migration Patterns Show a Majority Leaving Biggest Metros for More Affordable Markets*. ValuePenguin.Com.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(2), 171–181. <https://doi.org/10.31538/ijse.v1i1.68>
- Ohtake, F. (2012). Unemployment and happiness. *Japan Labor Review*, 9, 59–74.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics Ninth Edition*. Pearson.
- Plecher, H. (2020). *Germany: Distribution of employment by economic sector from 2009 to 2019*.
- Putri, D. A. (2016). Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2003-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–8.
- Rupasingha, A., & Marré, A. W. (2020). Moving to the hinterlands: Agglomeration, search costs and urban to rural business migration. *Journal of Economic Geography*, 20(1), 123–153. <https://doi.org/10.1093/jeg/lby057>
- Shuryhina, V. (2017). *Unemployment Policy: Youth Unemployment in Japan*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32796.49286>
- Siarait, A. F., Yulmardi, & Bahkti, A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 137–146.
- Simanjuntak, P. J. . (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subramaniam, T., & Baharumshah, A. Z. (2011). Determinants of Unemployment in the Philippines 1. *The Empirical Economics Letters*, 10(12).

- Sukamdi, S., & Mujahid, G. (2015). UNFPA Indonesia Monograph Series: Internal Migration in Indonesia. In *UNFPA Indonesia*.
- Taira, T. (2006). Ajankohtaista: Työ Ja Työttömyys Uskontotieteellisessä Aikalaistulkinnassa. *Elore*, 13(2), 1–7.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (S. Yagan, D. Battista, & M. Cadigan (eds.); Eleventh). Pearson Education, Inc.
- Turok, I., & McGranahan, G. (2013). Urbanization and Economic Growth: The Arguments and Evidence for Africa and Asia. In *Environment and Urbanization* (Vol. 25, Issue 2, pp. 465–482). <https://doi.org/10.1177/0956247813490908>
- United Nations. (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. In *Department of Economic and Social Affairs of United Nations*.
- Upadhya, A., & Unnikrishnan, S. (2017). A Study of Unemployment in India, Causes and Implication. *International Journal of Applied Research*, 3(4), 747–749.
- Urrutia, J. D., Tampis, R. L., & Atienza, J. E. (2017). An Analysis on the Unemployment Rate in the Philippines: A Time Series Data Approach. *IOP Science*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/820/1/012008>
- Valadkhani, A. (2003). Using Input-Output Analysis to Identify Australia's High Employment Generating Industries. *Australian Bulletin of Labour*, 29(3), 199–217.
- Van leeuwen, M. (2010). Crisis or Continuity? Framing Land Disputes and Local Conflict Resolution in Burundi. *Land Use Policy*, 27, 753–762. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.10.006>
- Viladecans-Marsal, E. (2004). Agglomeration economies and industrial location: City-level evidence. *Journal of Economic Geography*, 4(5), 565–582. <https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh040>
- Wang, X., & vom Hofe, R. (2007). Input-Output Analysis for Planning Purposes. In *Research Methods in Urban and Regional Planning: Vol. I* (Issue 1). Springer.
- Wibisono, C. G. (2020). Pengaruh Migrasi Masuk , Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Airlangga Development Journal*, 4(1), 83–105.
- World Bank. (2009). World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. In *World Bank*. The World Bank.
- World Urban Forum. (2006). *Montreal's Community Gardening Program*.